

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2025-2029



RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PELINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, serta berbekal semangat pengabdian yang tulus kepada negara dan masyarakat, maka Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 dapat disusun. Penyusunan Renstra ini berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi serangkaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan.

Rencana Strategis ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan serta sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar. Diharapkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam bentuk program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu tahun 2025-2029.

Semoga dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar dapat meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, dan kemandirian dalam pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di dalam mencapai tujuan organisasi serta dapat mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin terjadi.

Karanganyar, September 2025

Plt. Kepala DP3APPKB
Kabupaten Karanganyar



Drs. TITIS SRI JAWOTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19660923 198603 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-3
1.4. Sistematika Penulisan	I-4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH II-1	
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	II-1
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-5
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-6
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	II-23
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah.....	II-23
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II-23
2.2.2. Isu Strategis	II-25
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	III-1
3.1. Tujuan	III-1
3.2. Sasaran.....	III-3
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan Sasaran.....	III-8
3.4. Arah Kebijakan.....	III-11
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan	IV-1
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan....	IV-61
4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV-61
4.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	IV-63
BAB V PENUTUP.....	V-1
5.1. Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.2. Pedoman Transisi.....	V-1
5.3. Pedoman Penyusunan Evaluasi dalam Manajemen Pengelolaan Risiko.....	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2024	II-5
Tabel 2.2.	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat dan Gol/Ruang DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2024	II-5
Tabel 2.3.	Sarana dan Prasarana DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2024	II-6
Tabel 2.4.	Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-8
Tabel 2.5.	Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024	II-10
Tabel 2.6.	Capaian Indikator Kinerja Utama DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-11
Tabel 2.7.	Capaian Indikator Kinerja Kunci DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-11
Tabel 2.8.	Kinerja Program Kegiatan dan Subkegiatan DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-12
Tabel 2.9.	Rumusan Permasalahan DP3APPKB Kabupaten Karanganyar	II-23
Tabel 2.10.	Isu Strategis DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	II-26
Tabel 3.1.	Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	III-2
Tabel 3.2.	Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	III-4
Tabel 3.3.	Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	III-6
Tabel 3.4.	Tahapan Rencana Strategis	III-10
Tabel 3.5.	Arah Kebijakan Renstra DP3AP2KB Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	III-12
Tabel 4.1.	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar.....	IV-7
Tabel 4.2.	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	IV-24

Tabel 4.3.	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-45
Tabel 4.4.	Dukungan Kegiatan Kabupaten Karanganyar Terhadap 35 Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah yang di delegasikan ke Kabupaten/Kota	IV-58
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Utama DP3APPKB Kabupaten Karanganyar	IV-62
Tabel 4.6.	Indikator Kinerja Kunci DP3APPKB Kabupaten Karanganyar	IV-64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan	I-2
Gambar 2.1.	Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar	II-4
Gambar 4.1.	Pohon Kinerja DP3APPKB Kabupaten Karanganyar	IV-51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

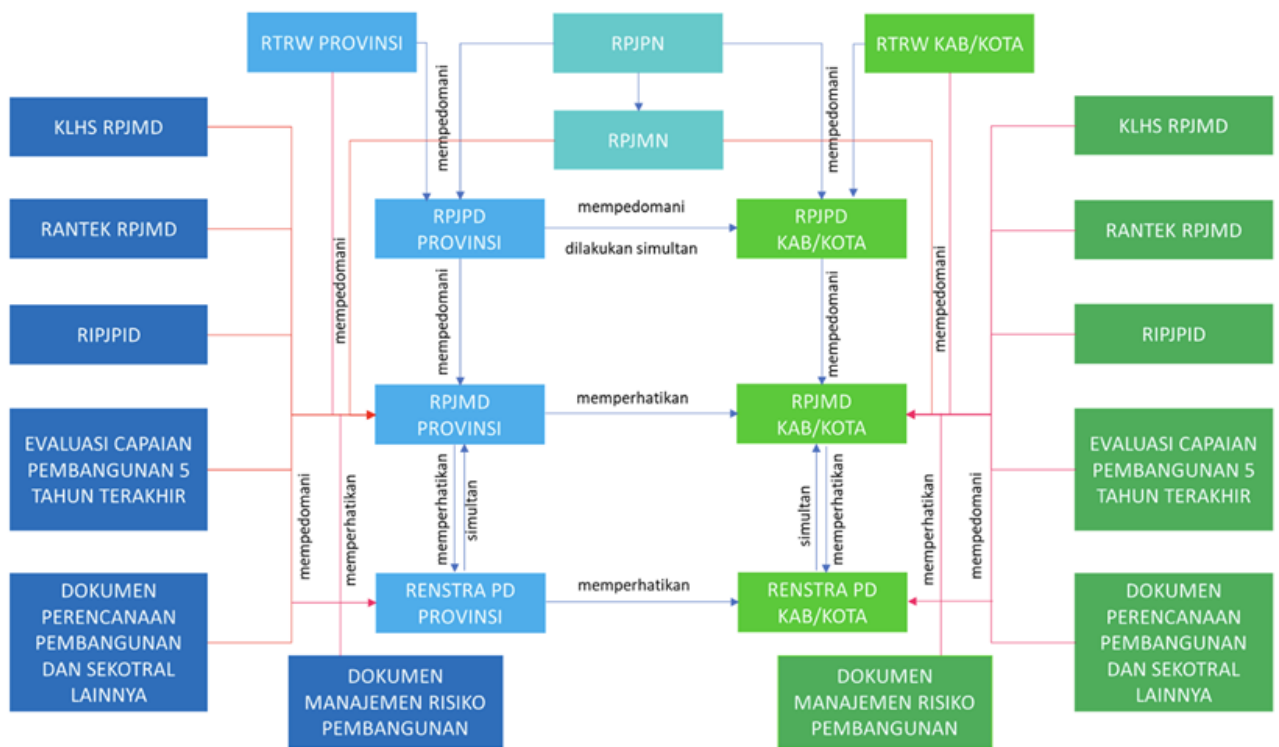
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah yang berorientasi pada kesetaraan gender, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan penguatan ketahanan keluarga. Renstra ini disusun sebagai pedoman bagi DP3APPKB dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, terutama dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengelolaan isu kependudukan, serta pelayanan dan penguatan program keluarga berencana di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar.

Landasan hukum penyusunan Renstra ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menekankan pentingnya perencanaan pembangunan secara terarah dan terintegrasi. Selain itu, dokumen ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan KB sebagai urusan wajib non-pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Renstra ini juga disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Dokumen ini diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 sebagai penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Sebagai perangkat daerah yang menangani isu-isu strategis lintas sektor, seperti kesenjangan gender, kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan angka kelahiran, serta ketahanan keluarga, DP3APPKB memiliki peran penting dalam mendorong pencapaian pembangunan manusia yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tantangan yang dihadapi mencakup tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, belum optimalnya kesetaraan akses dan partisipasi perempuan, peningkatan kebutuhan pelayanan KB dan informasi kependudukan, serta penguatan fungsi keluarga dalam menghadapi dinamika sosial.

Memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Karanganyar menyusun RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029. RPJMD tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, termasuk Renstra DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 1.1.
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Renstra DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan strategis lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD Kabupaten Karanganyar, serta kebijakan nasional di bidang Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dengan demikian, Renstra DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dalam mewujudkan keluarga tangguh, masyarakat setara, dan anak terlindungi di Kabupaten Karanganyar.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 181).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah, terutama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.
2. Memberikan arah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas, serta menjadi acuan bagi seluruh jajaran aparatur DP3APPKB dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah disepakati bersama.

Tujuan Penyusunan Renstra DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub-kegiatan pembangunan selama periode 2025–2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang menjadi kewenangan DP3APPKB serta sebagai dasar dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja selama periode perencanaan.
3. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) DP3APPKB Kabupaten Karanganyar yang memuat program dan kegiatan prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
Subbab ini menjelaskan alasan atau urgensi disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Subbab ini memuat peraturan perundang-undangan atau ketentuan normatif yang menjadi dasar penyusunan dokumen Renstra.
- 1.3. Maksud dan Tujuan
Subbab ini menjelaskan terkait maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- 1.4. Sistematika Penulisan
Subbab ini menggambarkan struktur atau susunan isi dari dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Pada subbab ini memuat tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan sesuai dengan tupoksinya, serta kelompok sasaran layanan. Pada gambaran pelayanan Perangkat Daerah dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti Mitra, dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja, dan kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
Pada subbab ini paling sedikit memuat Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah
Subbab ini menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh perangkat daerah selama periode Renstra (biasanya 5 tahun). Tujuan adalah pernyataan umum tentang arah pembangunan atau hasil jangka menengah yang akan dicapai.
- 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah
Subbab ini merinci sasaran sebagai penjabaran lebih operasional dari tujuan. Sasaran menggambarkan hasil yang lebih spesifik yang ingin dicapai dalam jangka menengah dan biasanya dapat diukur.

- 3.3. Strategi Perangkat Daerah
Subbab ini menjelaskan cara atau pendekatan umum yang akan dilakukan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Subbab ini menjelaskan pilihan-pilihan kebijakan atau fokus kegiatan yang akan diambil dalam rangka menjalankan strategi dan mencapai sasaran.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Uraian Program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikator dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.
- 4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU).
- 4.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yang menjadi urusan wajib non-pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adapun uraian tugas dan fungsi serta susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Kesekretariatan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
- e. pelaksanaan fungsi Kesekretariatan;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. pengkoordinasian tata laksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas unsur pelaksana Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang advokasi, penyuluhan dan penggerakan Keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang advokasi, penyuluhan dan penggerakan Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis advokasi, penyuluhan dan penggerakan Keluarga Berencana;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi, penyuluhan dan penggerakan Keluarga Berencana; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Keluarga Berencana

Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas unsur pelaksana bidang Keluarga Berencana. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis Keluarga Berencana;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Keluarga Berencana, dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, mempunyai fungsi :

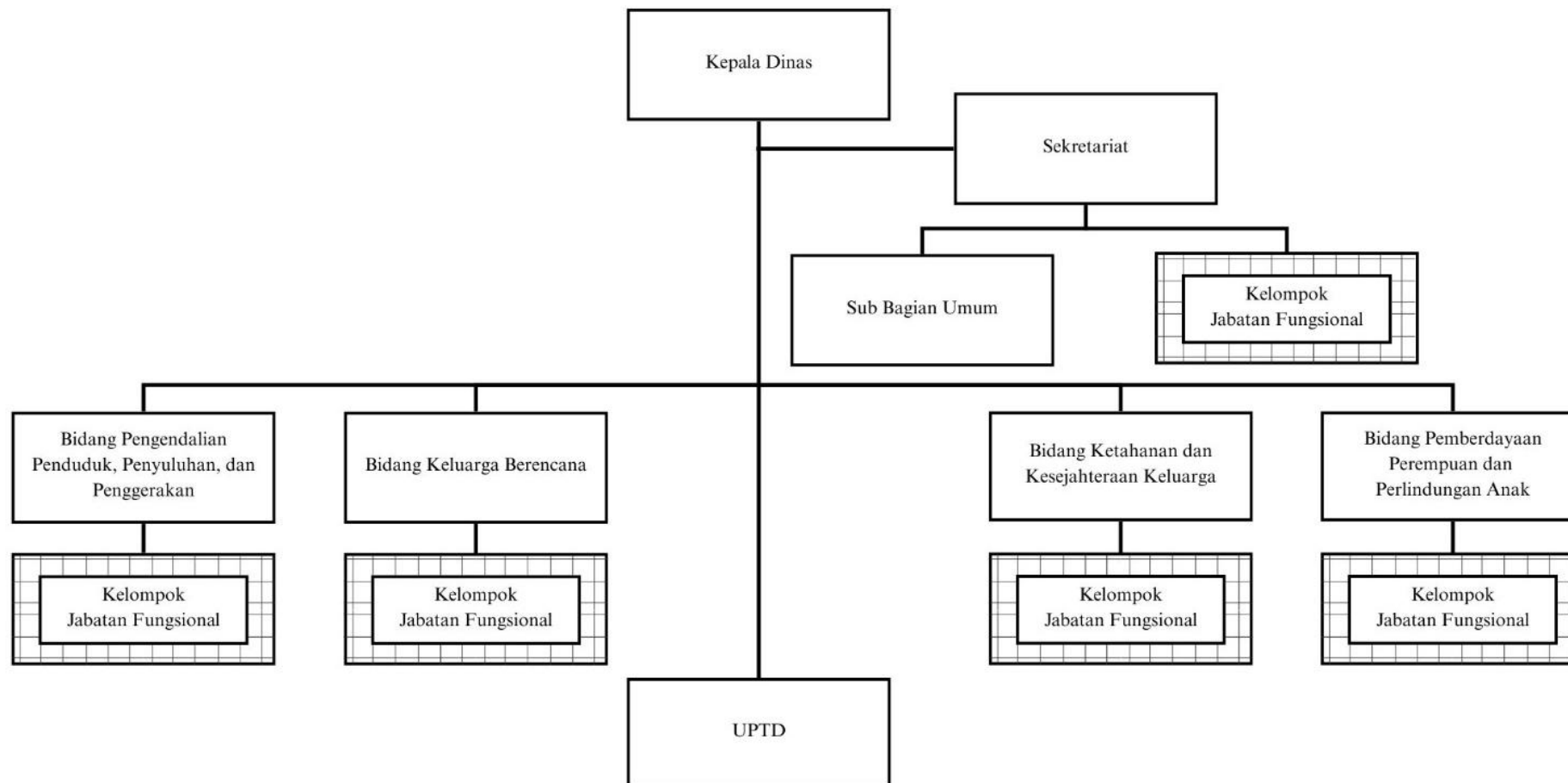
- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan dan Perempuan Perlindungan Anak, dan
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 2.1.
Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar

Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 106 Tahun 2021

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Data Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 menunjukkan bahwa mayoritas pegawai memiliki latar belakang pendidikan tinggi, yaitu sebanyak 19 orang (79%) berpendidikan S1 dan S2, yang mencerminkan kapasitas intelektual yang cukup untuk mendukung pelaksanaan program-program strategis dinas. Sebagian kecil lainnya berpendidikan D3 4 orang dan SLTA 1 orang, yang kemungkinan besar menduduki jabatan teknis atau administratif. Komposisi berdasarkan jenis kelamin menunjukkan dominasi perempuan 79% dibanding laki-laki 21%, selaras dengan mandat kelembagaan yang banyak menangani isu pemberdayaan perempuan dan anak. Hal ini mencerminkan bahwa SDM DP3APPKB cukup memadai secara kualitatif dan sensitif gender, namun tetap perlu penguatan dalam hal pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan lintas jenjang pendidikan.

Tabel 2.1.
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan
DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1.	S2	7	1	6
2.	S1	12	2	10
3.	DIII	4	1	3
4.	SLTA	1	1	0
Jumlah		24	5	19

Data SDM berdasarkan pangkat dan golongan ruang di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada Golongan III sebanyak 14 orang (58%), diikuti oleh Golongan IV sebanyak 6 orang (25%), dan Golongan II sebanyak 4 orang (17%). Tidak terdapat pegawai di Golongan I, yang menandakan bahwa seluruh SDM berada pada jenjang jabatan fungsional atau struktural dengan kualifikasi menengah hingga tinggi. Dari sisi gender, terdapat dominasi perempuan (79%) pada seluruh jenjang golongan, yang konsisten dengan karakteristik kelembagaan dinas ini. Komposisi ini menunjukkan bahwa DP3APPKB memiliki struktur SDM yang relatif matang dan berpengalaman, meskipun tetap diperlukan pengembangan karier dan peningkatan kompetensi berjenjang, terutama untuk mendorong akselerasi reformasi birokrasi dan efektivitas pelaksanaan program lintas urusan.

Tabel 2.2.
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat dan Gol/Ruang
DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

No	Pangkat/Gol	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1.	I	-	-	-
2.	II	4	1	3
3.	III	14	3	11
4.	IV	6	1	5
Jumlah		24	5	19

2. Sarana dan Prasarana

Data Sarana dan Prasarana DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 menunjukkan bahwa dinas ini memiliki infrastruktur penunjang kerja yang cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Gedung kantor seluas ±1.800 m² menjadi pusat pelayanan dan koordinasi program-program strategis, didukung oleh fasilitas transportasi seperti 1 unit mobil kepala dinas, 4 unit mobil operasional, serta 45 unit sepeda motor untuk petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), yang menunjukkan cakupan layanan lapangan yang luas. Selain itu, tersedia 2 unit motor Perlindungan Perempuan dan Anak yang mendukung penanganan kasus secara cepat. Ketersediaan perangkat teknologi seperti 76 unit komputer dan 40 unit laptop juga memperkuat sistem kerja berbasis digital dan mendukung efektivitas pelayanan administrasi dan data. Secara keseluruhan, sarana dan prasarana yang dimiliki cukup menunjang pelaksanaan program di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, meskipun pemeliharaan dan modernisasi peralatan perlu terus diperhatikan untuk menjaga kualitas layanan.

Tabel 2.3.
Sarana dan Prasarana DP3APPKB Kabupaten Karanganyar
Tahun 2024

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
Sarana dan Prasarana			
1	Gedung kantor (± 1.800 m ²)	1	Unit
2	Mobil Kepala Dinas	1	Unit
3	Mobil Operasional Dinas	4	Unit
4	Sepeda Motor Petugas PKB	45	Unit
5	Motor Perlindungan Perempuan dan Anak (TORLIN)	2	Unit
6	Komputer PC	76	Buah
7	Laptop	40	Buah
8	Gedung Penyuluhan KB Kecamatan	17	Unit
9	Gedung Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi	1	Unit
10	Gedung UPTD PPA	1	Unit
11	Mobil Unit Penerangan Keluarga Berencana (Mupen)	2	Unit
12	Mobil Unit Pelayanan KB (Muyan)	1	Unit
13	Mobil Box Alkon	2	Unit

Sumber : DP3APPKB Kabupaten Karanganyar, Tahun 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja penyelenggaraan pelayanan DP3APPKB Kabupaten Karanganyar selama periode 2020–2024 menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang perlu diperkuat. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif stabil dengan capaian di atas 97% dari target, mencerminkan upaya konsisten dalam meningkatkan kesetaraan gender meski realisasinya sedikit di bawah target tahunan. Sementara itu, capaian Total Fertility Rate (TFR) terus melampaui target, menunjukkan keberhasilan program pengendalian penduduk dan pelayanan KB secara signifikan, bahkan mencapai 128% pada tahun 2024. Penanganan keluarga

berisiko stunting juga menunjukkan perbaikan, dengan realisasi 10,54% dari target 22,5% di tahun 2024, mencerminkan efisiensi program meskipun indikator ini baru dimulai pada 2023. Di sisi tata kelola pemerintahan, nilai SAKIP mengalami fluktuasi namun tetap mendekati target, dengan capaian 97,47% di tahun 2024, menandakan komitmen terhadap perbaikan birokrasi meski masih perlu peningkatan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja secara menyeluruh.

Tabel 2.4.
Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdayasaing dan berkeadilan dengan semangat kegotongroyongan	Sasaran 1 : Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,56	74,76	100,26	74,71	74,29	99,44	74,81	73,38	98,09	74,95	73,69	98,32	73,48	71,65	97,51
	Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas pengendalian penduduk dan pelayanan KB	Total Fertility Rate (TFR)	2,53	2,53	100	2,53	2,51	101	2,5	2,22	111,2	2,5	2,16	113,6	2,16	1,94	128,24
	Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas penanganan keluarga berisiko Stunting	Persentase keluarga berisiko stunting	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9,78	100	22,5	10,54	153,16
Tujuan 2 : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Sasaran 4 : Meningkatkan tata kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	NA	NA	NA	NA	71,15	100	74,35	69,65	93,68	79,35	71,45	90,04	73	72,65	99,52

Realisasi anggaran DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang cukup optimal dengan rata-rata capaian realisasi yang tinggi di hampir seluruh program. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai program dengan alokasi terbesar mencapai realisasi 94,65%, sedangkan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) mencatat capaian sangat tinggi sebesar 99,50%. Beberapa program berhasil direalisasikan secara penuh seperti Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak (100%). Namun demikian, masih terdapat beberapa program yang capaian realisasinya relatif rendah, seperti Program Perlindungan Khusus Anak (84,81%) dan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (85,83%), yang mencerminkan perlunya evaluasi terhadap perencanaan kegiatan dan efektivitas pelaksanaan program. Secara keseluruhan, dinas telah mampu menjaga efisiensi belanja dengan tingkat serapan yang tinggi, namun tetap perlu meningkatkan optimalisasi pelaksanaan pada program yang berorientasi langsung ke masyarakat, khususnya dalam bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.

Tabel 2.5.
Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024

No.	Program	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.444.314.000,00	2.595.442.005,00	58,40	4.444.986.000	4.253.750.810	95,70	5.214.831.550	4.647.811.648	94,21	6.196.506.980	5.352.708.503	86,38	5.212.936.026	4.934.029.000	94,65
2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	35.000.000	35.000.000	100,00	40.000.000	37.241.200	93,10	70.000.000	63.539.800	90,77	25.000.000	21.457.816	85,83
3	Program Perlindungan Perempuan	95.000.000,00	74.960.000,00	78,91	232.445.000	68.684.000	29,55	74.791.000	34.840.000	46,58	35.000.000	31.625.000	90,36	30.000.000	27.643.300	92,14
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.000.0000	100.000.000	100,00	100.000.0000	100.000.000	100,00	100.000.000	100.000.000	100,00
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.400.000	14.400.000	100,00	NA	NA	NA	10.000.000	9.999.500	100,00
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	NA	NA	NA	95.000.000	87.951.000	92,58	140.000.000	130.948.500	93,53	105.000.000	70.845.800	67,47	195.000.000	180.935.250	92,79
7	Program Perlindungan Khusus Anak	NA	NA	NA	198.695.000	37.876.000	19,06	90.674.000	50.715.050	55,93	35.000.000	27.990.000	79,97	30.000.000	25.444.000	84,81
8	Program Pengendalian Penduduk	1.023.453.000,00	981.671.500,00	95,92	160.000.000	156.502.300	97,81	286.328.000	275.922.634	96,37	375.640.000	367.375.721	97,80	510.200.000	500.995.355	98,20
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana(KB)	5.742.312.000,00	3.832.945.480,00	66,75	6.343.260.000	5.407.232.300	85,24	5.665.769.700	5.310.027.457	93,72	7.796.183.300	7.252.536.239	93,03	9.782.995.000	9.387.439.096	95,96
10	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	755.000.000,00	532.537.000,00	70,53	1.064.800.000	1.023.327.850	96,11	4.753.820.000	3.665.942.260	87,93	5.058.400.000	5.023.796.000	99,32	5.018.400.000	4.993.126.700	99,50

Tabel 2.6.
Capaian Indikator Kinerja Utama DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Pada Tahun					Realisasi Capaian Pada Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,352	0,374	0,279	0,262	NA	100	100	100	100
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	74,56	74.71	74,81	74,95	73,48	74,76	74.29	73,38	73,69	71,65	100,26	99.44	98,09	98,32	97,51
Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	752	762	770	780	790	NA	757.9	642,35	622,43	608	100	99.46	83,42	79,80	76,96
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	NA	NA	NA	NA	NA	1,33	0,98	0,94	0,74	0,71	100	100	100	100	100
Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Angka	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	67,45	NA	100	100	100	100
TFR (Angka Kelahiran Total)	Indeks	2,53	2.46	2.22	2.22	2,16	2,53	2,46	2,22	2,16	1,94	100	100	100	102,78	111,34

Tabel 2.7.
Capaian Indikator Kinerja Kunci DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Pada Tahun					Realisasi Capaian Pada Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	Angka	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	65,9	100	100	100	100	100
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	75,10	75,25	75,5	76	76,5	74,74	75.15	71,57	73,22	70,22	99,52	99.86	94,79	96,34	91,79
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	12,51	12,21	13,12	12,19	8,94	0,59	60,60	56,40	60,70	82,77
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	NA	6,5	7	7,5	8	NA	7,75	8,04	8,69	8,7	NA	119, 23	114,29	115,87	143
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	/100.000 penduduk	NA	4,02	4,00	3,97	4,2	NA	4,02	4,00	3,97	4,2	100	100	100	100	100

Tabel 2.8.
Kinerja Program Kegiatan dan Subkegiatan DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

No	P	K	SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100				
				Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	100	100	
				Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Nilai					80
1)			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	10	10		10	10
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja	Bulan	12	12	12		
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap				10	6
2)			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Dokumen Keuangan	Lap	4	4	4	4	4
			Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji ASN	Tahun	1	1	1		
				Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang				35	27
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan kegiatan, laporan keuangan	tahun	1	1	1		
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lap				16	4
3)			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Dokumen Barang Milik Daerah	Lap					2
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap					2
4)			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksana Administrasi Umum Urusan Pemerintah	Keg	5	5	5	5	5
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	9	22	22	24	22
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	5	4	4
				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tahun	1	1			

			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	lembar			125.000		
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket				200	8
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minuman rapat dan jamuan tamu	Tahun	1	1	1		
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lap				5	5
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	Tahun	1	1	1		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap				40	36
5)			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibutuhkan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kinerja	Unit	1	1	2	2	2
			Pengadaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung dan bangunan lainnya yang dibangun	Unit	1	1	1		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	1	2	2	2
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	5	2	17	5
6)			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksana Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Keg	3	3	3	3	3
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkelolanya surat masuk dan surat keluar	tahun	1	1			
				Terkelolanya surat masuk dan surat keluar	surat			6.000		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap				2	2
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan jasa kantor	tahun	1	1	1		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap				3	3
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	tahun	1	1	1		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap				4	4
7)			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Unit	1	1	1	14	41
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tahun	1	1			

			Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit			2	54	14
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	5	2	15	10
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	2	17
2.	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	persen	100				
				Lembaga Pemerintah yang Responsif Gender	Lembaga		50	50	40	42
1)			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah melaksanakan PUG	OPD	35	45	50	40	42
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi focal point PUG tingkat Kabupaten	Keg	4				
				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	Tahun		1	1		
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dok				40	42
			Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	40	40	50	42	42
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			Persentase kasus kekerasan perempuan	Persen	0,005	0,004	0,0046	0,0055	0.0042
1)			Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan selama 1 tahun	Keg	1	1	1	2	4
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tahun	1	1	1		

			Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dok					2	1	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten	Tahun	1	1	1				
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah					20	40	
2)			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	Layanan	20	35	20		10	1	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Kegiatan	2	2					
				Tersedianya layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	Tahun				1			
				Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan					10	1	
4.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			Presentase Angka Perceraian	Persen		14,24					
				Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang Dilayani secara Komprehensif	Persen				100	100	100	
1)			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak	Layanan		1	1		1	1	
			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Layanan		1	1		1	1	
5.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			Tersedianya data Data Gender dan Anak	Tahun				1			

			Persentase OPD yang memiliki Data Gender	Persen					40,48
1)		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengumpulan / pengolahan analisis penyajian data gender dalam 1 tahun	Keg			1	1	1
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data Data Gender dan Anak	Tahun			1		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten / Kota yang Tersedia	Dok				1	1
6.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Desa Layak anak	persen		5			
			Jumlah desa layak anak	Desa			2	2	4
1)		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan dalam Kelembagaan PHA pada Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha	Keg		2	2	1	1
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan peningkatan kualitas hidup anak	Tahun		1	1		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi				5	4
2)		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga peduli anak yang difasilitasi	lembaga		1	1	1	1
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya KIE PHA pada lembaga penyedia layanan	Tahun		1	1		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/4Kota	Dok				16	1
7.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Prosentase kasus kekerasan anak	persen	0,001	0,0075	0,0079	0,0027	0,0073
1)		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan pada anak selama 1 tahun	Keg		1	1	1	1
			Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	Tahun		1	1		

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Dok				4	
		Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	Keg					2
2)		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Peduli Anak yang Difasilitasi	lembaga		1	1	1	1
		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah layanan AMPK	layanan		200	120	84	
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	orang					20
3)		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak	Keg		1	1	1	1
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan	Tahun		1	1		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dok				1	
		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten//Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	orang					2
8.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		ASFR	Indeks	4,35	4,22	4,20	7,4	4
1)		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kegiatan sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam pengendalian kualitas penduduk	Keg	1	1	1	5	1

		Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Dok	1	1	1	5	2
2)		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Keg	5	1	1	1	1
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Lap	1	1	14	17	4
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dok	1	1	14	17	2
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Lap	1	1	14	17	12
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi KB	Keg	23				
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB serta jasa internet balai penyuluhan KB	Dok		1	14	17	12
		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Lap					2
9.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR	Angka	74,74	75,15	75,25	73,22	70,22
			Prosentase Desa/kelurahan memiliki kampung KB	Angka	32	35	36	39	100
1)		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah kegiatan advokasi, KIE pengendalian penduduk dan KB	Keg	6	1	1	1	1
		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terlaksananya operasional Pokja KB Kecamatan	Keg	3				
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Org		30	30	30	30
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya pelayanan KIE	Keg	6				
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Program Bangsa Kencana Pembangunan	Dok		1	1	17	2

				Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan						
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Lap	17	17	17	17	2
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Lap	1	1	1	17	17
			Pengendalian Program KKBPK	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Lap	1	1	1	1	2
2)			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB yang Difasilitasi	Orang	45	48	40	38	40
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	1827	1827	1827	1827	1827
			Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyulu h Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Lap					12
3)			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB	Keg	1	1	1	1	1
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke Faskes	Faskes		41			
				Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Lap	1		1	12	1

			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Peremopuan Menikah Usia 15-49 tahun	persen	74,74				
				Presentase KB MKJP	persen		32			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang		3455	4181	4029	5436
			Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan	1	1	1	10	1
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Paket Sarana Penunjang Pelayanan KB	Paket	35	57	0	51	2
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	1	1	12	1
			Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Terlaksananya KIE pasca kelahiran tentang kesehatan ibu dan anak	Kegiatan	3				
				Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Orang		30	30	1000	75
			Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang	50	50	50	50	14
4)			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Keg	1	1	1	1	1
			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dok	1	1	1	2	12
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung	56	61	64	69	177
10.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			Prosentase tribina aktif	persen	85	88	90	91	91,76

1)		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Keg	1	1	1	1	1
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL,PPKS ,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	29	10	15	20	31
		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)	Terlaksananya orientasi dan bimtek pengelola PIK-KRR	Keg	3	2			
			Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang			54	170	68
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	102	72	102	40972	68
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya advokasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kegiatan	3				
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan		1	1	1	2
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	1	1	1	1	2
2)		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam	Jumlah kegiatan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan	Kegiatan	2	1	1	1	1

		Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga						
		Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	2	1	1	1	2
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	1	1	1	2	3
		Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan	1	1	1	1	2
		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran ,Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pascasalin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan					12
		Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran , Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Laporan					12

2.1.4. **Kelompok Sasaran Layanan**

1. **Perempuan**

Khususnya perempuan usia produktif, rentan menjadi korban kekerasan, atau mengalami ketidaksetaraan gender. Meliputi pendampingan, pelatihan keterampilan & pendampingan usaha.

2. **Anak-anak & Remaja**

Termasuk anak rentan, anak korban kekerasan, serta siswa sekolah untuk program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).

3. **Keluarga**

Keluarga prasejahtera, keluarga remaja, atau keluarga rentan, sebagai penerima intervensi peningkatan ketahanan, ekonomi, KB, dan pencegahan stunting

4. **Pasangan Usia Subur (PUS)**

Pria dan wanita usia 15-49 tahun sebagai sasaran program Keluarga Berencana (KB), termasuk metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).

5. **Masyarakat pada Umumnya**

Sasaran kegiatan advokasi, sosialisasi, dan KIE kependudukan, kesetaraan gender, perlindungan anak, KB, serta pencegahan kekerasan dan TPPO

6. **Penyuluh KB**

Sebagai pelaksana di lapangan, diberikan pembinaan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas dalam pelayanan KB dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak

7. **Sekolah & Siswa di Kabupaten Karanganyar**

Termasuk SMA/SMK untuk pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan advokasi pendidikan kependudukan.

2.2. **Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

2.2.1. **Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, DP3APPKB tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Beberapa masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan program/ kegiatan di atas antara lain adalah :

Tabel 2.9.
Rumusan Permasalahan DP3APPKB Kabupaten Karanganyar

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Tata kelola internal dan koordinasi kelembagaan belum optimal	Belum optimalnya koordinasi internal antar-subbagian dan antar bidang	Belum adanya mekanisme koordinasi rutin yang terstruktur; lemahnya komunikasi lintas unit
	Belum optimalnya integrasi PUG dalam perencanaan dan penganggaran daerah	Kapasitas SDM perencana terkait PUG masih terbatas; kurangnya komitmen pimpinan
	Belum optimalnya mekanisme koordinasi lintas sektor (dinas, aparat penegak hukum, masyarakat)	Belum adanya SOP baku koordinasi; ego sektoral masih kuat
Perlindungan perempuan	Belum optimalnya sistem pelaporan dan penanganan	Mekanisme pelaporan belum sederhana;

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
dan anak belum maksimal	kasus kekerasan terhadap perempuan	keterbatasan tenaga pendamping; koordinasi belum efektif
	Kurangnya jumlah tenaga pendamping dan layanan rujukan berbasis komunitas	Belum adanya distribusi pendamping yang merata; kapasitas kelembagaan terbatas
	Belum optimalnya penerimaan masyarakat terhadap korban kekerasan (stigma sosial)	Norma budaya patriarkal masih kuat; rendahnya edukasi masyarakat
	Minimnya tenaga dan fasilitas untuk menangani kasus anak berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan, atau eksploitasi	Keterbatasan SDM profesional; sarana pendukung terbatas
	Belum optimalnya pelaporan kasus secara aktif dari masyarakat	Korban takut melapor karena stigma; belum adanya sistem perlindungan saksi yang kuat
Penguatan ketahanan keluarga belum merata	Belum optimalnya jangkauan edukasi keluarga terkait pengasuhan anak, kesehatan reproduksi, dan perencanaan keluarga	Keterbatasan tenaga penyuluh; distribusi tidak merata
	Belum optimalnya partisipasi keluarga dalam program pembinaan karena waktu dan akses	Jadwal program tidak fleksibel; akses geografis sulit
	Belum optimalnya media edukasi yang menarik dan mudah dipahami oleh keluarga sasaran	Kurangnya inovasi media edukasi; keterbatasan pemanfaatan teknologi
	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan ber-KB (unmet need) di beberapa wilayah	Kurangnya tenaga penyuluh dan kader KB; hambatan budaya terkait KB
	Kurangnya tenaga penyuluh dan kader KB aktif di lapangan	Rekrutmen terbatas; insentif rendah
	Hambatan kultural dan sosial dalam penyuluhan terkait kesehatan reproduksi dan KB	Nilai budaya tertentu menolak diskusi terbuka soal reproduksi; rendahnya literasi kesehatan
	Belum optimalnya partisipasi antar wilayah desa/kelurahan dalam kegiatan UPPKA dan program ketahanan keluarga	Perbedaan kapasitas kelembagaan desa; motivasi kader bervariasi
Pengelolaan data dan kapasitas	Data belum sepenuhnya terintegrasi antar sektor dan	Sistem aplikasi data belum terhubung lintas sektor;

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
SDM belum optimal	belum tersedia secara real-time	keterbatasan infrastruktur TIK
	Belum optimalnya kapasitas SDM dalam pengelolaan dan analisis data responsif gender dan anak	SDM belum terlatih secara teknis; pelatihan berkelanjutan kurang
	Belum optimalnya kualitas pelaporan dari tingkat desa/kelurahan	Kapasitas aparat desa bervariasi; belum adanya standar pelaporan yang seragam
Pemenuhan hak anak belum sepenuhnya terwujud	Belum optimalnya pemahaman hak anak di kalangan orang tua, guru, dan masyarakat	Sosialisasi belum intensif; belum adanya materi edukasi yang mudah dipahami
	Belum optimalnya partisipasi anak dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat lokal	Belum adanya forum anak yang berfungsi maksimal; partisipasi anak belum difasilitasi
	Keterbatasan sarana ramah anak di fasilitas publik dan layanan dasar	Belum adanya standar fasilitas ramah anak; pemeliharaan sarana terbatas
Pemberdayaan ekonomi keluarga belum merata	Terbatasnya akses terhadap pelatihan keterampilan dan bantuan ekonomi	Program pelatihan belum menjangkau semua wilayah; informasi terbatas
	Belum optimalnya inovasi program berbasis potensi lokal dalam pemberdayaan keluarga	Pendampingan usaha belum optimal; pemetaan potensi lokal kurang

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan utama yang perlu segera ditangani dalam periode perencanaan karena berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Penetapan isu strategis dilakukan melalui diskusi dan identifikasi bersama antar bidang di lingkungan DP3APPKB Kabupaten Karanganyar, dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, seperti RPJMN, Renstra Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN), serta Renstra Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang PPPA dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, berikut ini dirumuskan isu-isu strategis DP3APPKB Kabupaten Karanganyar untuk periode perencanaan tahun 2025–2029 :

Tabel 2.10.
Isu Strategis DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan DP3APPKB	Permasalahan DP3APPKB	Isu KLHS yang Relevan Dengan DP3APPKB	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan DP3APPKB			Isu Strategis DP3APPKB
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
• Banyaknya kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di desa-desa yang dapat dikembangkan melalui pelatihan kewirausahaan dan akses pemasaran. • Tersedianya kader PKK, Posyandu, dan Kader KB yang aktif menjadi ujung tombak pelaksanaan program keluarga berencana, ketahanan keluarga, serta edukasi gender dan perlindungan anak. • Keberadaan Forum Anak di berbagai kecamatan yang dapat diberdayakan	• Koordinasi internal antar bidang/subbagian belum optimal. • Mekanisme koordinasi lintas sektor masih lemah. • Kualitas pelaporan dari tingkat desa/kelurahan belum konsisten. • Integrasi PUG dalam perencanaan dan penganggaran belum optimal. • Kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi, namun sistem pelaporan dan penanganan belum responsif. • Tenaga pendamping dan layanan rujukan berbasis komunitas masih kurang.	-	• Agenda global seperti <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) menekankan pentingnya kesetaraan gender (SDG 5), penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penguatan hak reproduksi. • Fenomena keluarga kecil, keterbatasan waktu pengasuhan, hingga meningkatnya <i>household single parent</i> berdampak	• Data nasional menunjukkan peningkatan pelaporan kasus KDRT, pelecehan seksual, dan perundungan yang memerlukan penguatan sistem perlindungan dan layanan. • Perempuan masih menghadapi hambatan dalam partisipasi ekonomi produktif dan pengambilan keputusan. • Meskipun capaian nasional TFR membaik, masih terdapat daerah dengan capaian KB	• Kualitas SDM yang Berkarakter	1. Belum Optimalnya Perwujudan Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Anak 2. Belum Optimalnya Implementasi dan Pemanfaatan Program bangga Kencana

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan DP3APPKB	Permasalahan DP3APPKB	Isu KLHS yang Relevan Dengan DP3APPKB	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan DP3APPKB			Isu Strategis DP3APPKB
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
untuk mendorong partisipasi anak dalam pembangunan. • Sebaran kampung KB dan program Kampung Kencana di sejumlah desa yang bisa dimaksimalkan sebagai pusat edukasi, integrasi layanan KB, stunting, dan ketahanan keluarga. • Budaya lokal yang kuat dalam nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong menjadi modal sosial dalam penguatan ketahanan keluarga dan perlindungan perempuan-anak.	• Stigma terhadap korban kekerasan masih terjadi. • Pemahaman hak anak di masyarakat masih rendah. • Partisipasi anak dalam pembangunan daerah belum maksimal. • Sarana ramah anak masih terbatas di fasilitas publik. • Penanganan kasus anak korban kekerasan dan hukum masih kekurangan SDM dan fasilitas. • Pelaporan kasus anak oleh masyarakat masih minim. • Unmet need KB masih tinggi di beberapa wilayah. • Kurangnya tenaga penyuluh dan kader KB aktif.		pada peran keluarga dan kebutuhan intervensi sosial. • Mobilitas tinggi lintas negara memicu kerentanan perempuan dan anak terhadap eksploitasi dan perdagangan orang (TPPO).	yang belum optimal. • Fokus nasional pada penguatan peran keluarga dan pengasuhan holistik mendorong dinas untuk lebih integratif dalam pelayanannya.		

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan DP3APPKB	Permasalahan DP3APPKB	Isu KLHS yang Relevan Dengan DP3APPKB	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan DP3APPKB			Isu Strategis DP3APPKB
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	• Edukasi keluarga tentang pengasuhan dan kesehatan reproduksi belum menjangkau luas. • Partisipasi keluarga dalam pembinaan rendah karena keterbatasan waktu dan akses. • Hambatan kultural masih menghambat penyuluhan KB. • Kesenjangan partisipasi antar wilayah dalam kegiatan UPPKS dan ketahanan keluarga. • Akses pelatihan dan bantuan ekonomi masih terbatas. • Inovasi program berbasis potensi lokal belum berkembang. • Data gender dan anak belum terintegrasi antar					

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan DP3APPKB	Permasalahan DP3APPKB	Isu KLHS yang Relevan Dengan DP3APPKB	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan DP3APPKB			Isu Strategis DP3APPKB
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	sektor dan tidak real-time. • Kapasitas SDM dalam pengelolaan dan analisis data masih rendah.					

1. Belum optimalnya perwujudan kesetaraan dan keadilan gender dan anak.

Isu ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dan perlindungan anak di Kabupaten Karanganyar masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi kebijakan, kapasitas SDM, maupun dukungan lintas sektor. Masih terbatasnya pemahaman tentang pentingnya kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak, serta belum optimalnya integrasi perspektif gender dan anak dalam perencanaan pembangunan, berdampak pada rendahnya efektivitas program. Di sisi lain, masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta minimnya partisipasi anak dalam proses pembangunan, menjadi indikator bahwa sistem perlindungan dan pemberdayaan belum berjalan optimal secara menyeluruh.

2. Belum optimalnya implementasi dan pemanfaatan program bangga kencana.

Isu ini mencerminkan masih kurangnya implementasi dan pemanfaatan program bangga kencana khususnya yang menyangkut kualitas kampung keluarga berkualitas, rumah data kependudukan, dan sekolah siaga kependudukan. Program bangga kencana tersebut sebagian besar masih terbatas dalam administrasi tanpa penguatan fungsi nyata sebagai pusat integrasi program lintas sektor.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan

Pasangan Kepala Daerah terpilih telah resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar pada tanggal 20 Februari 2025. Masa jabatan mereka akan berlangsung selama periode 2025 hingga 2030. Visi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar adalah **“SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR : Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang Berintegritas, Berdaya Saing, dan Sejahtera”**. Dalam rangka mencapai visi tersebut, misi RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan misi kepala daerah Kabupaten Karanganyar yang terpilih :

1. Misi 1 Meningkatkan kualitas sumber daya insani, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga dan pemuda serta kesetaraan gender.
2. Misi 2 Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui perluasan peluang usaha, penciptaan lapangan kerja sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kemandirian
3. Misi 3 Membangun dari desa, membangun infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan penanganan perlu pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan dan pemerataan ekonomi.
4. Misi 4 Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintah yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik
5. Misi 5 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar berkontribusi pada misi 1 yaitu **“Meningkatkan kualitas sumber daya insani, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga dan pemuda serta kesetaraan gender”**. Rumusan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya masyarakat yang setara, berkeadilan, dan berkualitas melalui peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak, penguatan pengendalian penduduk dan pelayanan KB, peningkatan kualitas pembangunan keluarga.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,262	0,262	0,260	0,259	0,257	0,256	0,255
	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,75	0,7	0,68	0,65	0,63	0,61	0,60
	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Angka	67,45	66,67	66,68	66,69	66,70	66,71	66,72

3.2. Sasaran

Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar tahun 2025-2029 adalah Terwujudnya masyarakat yang setara, berkeadilan, dan berkualitas melalui peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak, penguatan pengendalian penduduk dan pelayanan KB, peningkatan kualitas pembangunan keluarga. Tujuan tersebut di dukung oleh 3 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak
2. Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

Sasaran dan indikator kinerja jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar tahun 2025-2029 dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
S1. Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan gender (IPG)	Angka	71,65	71,66	71,67	71,68	71,69	71,70	71,71
	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	608	622,45	622,46	622,47	622,48	622,49	622,50
S2. Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	1,94	1,95	1,98	1,99	2,00	2,00	2,00
	IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	Angka	65,9	66,2	66,5	66,7	66,9	67,1	67,5
S3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	Nilai	82,12	82,21	82,28	82,34	82,40	82,45	82,52

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar tahun 2025-2029 dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Tahun					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya insani, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga dan pemuda serta kesetaraan gender Tujuan 3: Meningkatnya daya saing Kabupaten Karanganyar Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas SDM	Terwujudnya masyarakat yang setara, berkeadilan, dan berkualitas melalui peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak, penguatan pengendalian penduduk dan pelayanan KB, peningkatan kualitas pembangunan keluarga.		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,262	0,262	0,260	0,259	0,257	0,256	0,255
		S1. Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan gender (IPG)	Angka	97,16	97,30	97,45	97,60	97,75	97,90	98,00
			Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	608	622,45	622,46	622,47	622,48	622,49	622,50
			Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,75	0,7	0,68	0,65	0,63	0,61	0,60
			Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Angka	67,45	66,67	66,68	66,69	66,70	66,71	66,72
		S2. Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	1,94	1,95	1,98	1,99	2,00	2,00	2,00

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Tahun					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
yang inklusif, berkarakter dan adil			IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	Angka	65,9	66,2	66,5	66,7	66,9	67,1	67,5
		S3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	Nilai	82,12	82,21	82,28	82,34	82,40	82,45	82,52

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan Sasaran

Strategi merupakan serangkaian langkah sistematis yang memuat program-program indikatif sebagai upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Sementara itu, kebijakan mencerminkan arah atau tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan.

Strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar dirancang sebagai instrumen untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, serta target kinerja hasil (*outcome*) dalam mendukung RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029. Perumusan strategi ini mempertimbangkan tugas dan fungsi utama dinas, serta tantangan pembangunan daerah yang terkait dengan kesetaraan gender, perlindungan kelompok rentan, pengendalian pertumbuhan penduduk, serta peningkatan kualitas ketahanan keluarga.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, memperkuat ketahanan keluarga, mendorong peran aktif perempuan dan anak dalam pembangunan, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk yang seimbang, DP3AP2KB Kabupaten Karanganyar menetapkan strategi-strategi utama yang adaptif terhadap dinamika sosial, sensitif terhadap isu gender dan anak, serta inklusif terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam pembangunan.

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak

1. Meningkatkan integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Hak Anak dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
2. Mengembangkan sistem layanan perlindungan perempuan dan anak yang responsif, cepat tanggap, dan berbasis komunitas.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, SDM, dan jejaring perlindungan perempuan dan anak hingga tingkat desa/kelurahan.
4. Menguatkan forum anak dan partisipasi perempuan serta anak dalam proses pembangunan daerah.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk

1. Meningkatkan cakupan pelayanan KB yang merata dan responsif terhadap kelompok rentan.
2. Memperkuat peran tenaga lini lapangan (penyuluh KB, kader) dan Kampung KB dalam edukasi dan layanan pengendalian penduduk.
3. Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk penguatan program Bangga Kencana dan pengendalian TFR.
4. Meningkatkan pembinaan ketahanan keluarga melalui edukasi, konseling, dan pendampingan berbasis siklus kehidupan.
5. Mendorong pengembangan kelompok UPPKA dan program pemberdayaan ekonomi keluarga.
6. Mengembangkan inovasi program keluarga berbasis kearifan lokal dan potensi desa.
7. Menguatkan peran keluarga dalam pencegahan stunting, kekerasan, dan disfungsi sosial.

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja berbasis hasil (SAKIP).

2. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan teknis urusan PPPA dan pengendalian penduduk.
3. Mengembangkan sistem informasi manajemen pelayanan dan data responsif gender dan anak.
4. Mendorong akuntabilitas, transparansi, dan inovasi layanan publik berbasis digital.

Tabel 3.4.
Tahapan Rencana Strategis

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Tata Kelola Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga	Peningkatan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Dukungan Ketahanan Keluarga	Transformasi Layanan PPPA, KB, dan Keluarga Berbasis Digital dan Inklusif	Terwujudnya Tata Kelola Pelayanan PPPA, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana yang Responsif, Inklusif, dan Berkelanjutan
Fokus utama pada konsolidasi internal, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program PPPA, pengendalian penduduk, dan KB. Termasuk di dalamnya penguatan kelembagaan PUG, revitalisasi Forum Anak, pelatihan penyuluh KB, serta penataan sistem perencanaan dan pelaporan yang responsif gender dan ramah anak.	Prioritas diarahkan pada perluasan akses perempuan, anak, dan keluarga dalam proses pembangunan melalui pemberdayaan ekonomi, penguatan kelompok UPPKA, edukasi pengasuhan anak, serta peningkatan kapasitas partisipatif anak dan perempuan di tingkat desa/kelurahan. Termasuk penguatan kampung KB dan pelibatan lintas sektor dalam edukasi hak perempuan dan anak.	Penekanan pada pengembangan layanan rujukan kekerasan yang cepat, terpadu, dan mudah dijangkau masyarakat. Program difokuskan pada peningkatan layanan konsultasi keluarga, perlindungan anak berhadapan dengan hukum, serta penguatan keluarga sebagai fondasi pencegahan stunting, kekerasan, dan disfungsi sosial. Diperkuat pula dengan advokasi kebijakan daerah yang mendukung sistem perlindungan yang inklusif.	Transformasi sistem pelayanan dilakukan melalui digitalisasi layanan, pemanfaatan big data responsif gender dan anak, serta penerapan inovasi dalam penyuluhan KB dan pengasuhan keluarga. Layanan PPPA dan KB diarahkan agar lebih adaptif, inklusif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marjinal.	Tahap ini merupakan puncak dari konsolidasi dan transformasi layanan. Tujuannya adalah membentuk sistem tata kelola pelayanan yang berkelanjutan, berbasis hak, dan mampu menjamin kesetaraan, perlindungan, serta kesejahteraan keluarga di Kabupaten Karanganyar. Semua program telah terintegrasi dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.

3.4. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Pembangunan DP3AP2KB Kabupaten Karanganyar dengan memperhatikan arah kebijakan RPJMD, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik yang nyaman, cepat, dan mampu menciptakan kepuasan masyarakat, difokuskan pada :

1. Peningkatan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak melalui penguatan sistem pelaporan kekerasan, percepatan penanganan kasus, dan peningkatan layanan rujukan yang mudah diakses dan ramah korban.
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan dengan memperluas cakupan pelayanan, penguatan kader, serta penyediaan sarana yang nyaman dan inklusif.
3. Digitalisasi layanan PPPA dan KB guna mempercepat alur layanan, memperluas jangkauan informasi, serta mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses layanan berbasis gender dan anak.
4. Peningkatan edukasi dan konseling keluarga melalui pendekatan yang komunikatif, partisipatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat untuk membangun keluarga yang tangguh dan berkualitas.
5. Penguatan integrasi layanan lintas sektor untuk memastikan pelayanan kepada perempuan, anak, keluarga, dan kelompok rentan terlaksana secara holistik, terkoordinasi, dan berkesinambungan.

Tabel 3.5.
Arah Kebijakan Renstra DP3AP2KB Kabupaten Karanganyar
Tahun 2025-2029

Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi PD	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya masyarakat yang setara, berkeadilan, dan berkualitas melalui peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak, penguatan pengendalian penduduk dan pelayanan KB, peningkatan kualitas pembangunan keluarga.	S1. Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak S2. Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk	• Meningkatkan integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Hak Anak dalam perencanaan dan penganggaran daerah. • Mengembangkan sistem layanan perlindungan perempuan dan anak yang responsif, cepat tanggap, dan berbasis komunitas. • Meningkatkan kapasitas kelembagaan, SDM, dan jejaring perlindungan perempuan dan anak hingga tingkat desa/kelurahan. • Menguatkan forum anak dan partisipasi perempuan serta anak dalam proses pembangunan daerah. • Meningkatkan cakupan pelayanan KB yang merata dan responsif terhadap kelompok rentan. • Memperkuat peran tenaga lini lapangan (penyuluh KB, kader) dan Kampung KB dalam edukasi dan layanan pengendalian penduduk. • Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk penguatan program Bangga Kencana dan pengendalian TFR. • Meningkatkan pembinaan ketahanan keluarga melalui edukasi, konseling, dan pendampingan berbasis siklus kehidupan.	• Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak anak difokuskan pada perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender	• Peningkatan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak melalui penguatan sistem pelaporan kekerasan, percepatan penanganan kasus, dan peningkatan layanan rujukan yang mudah diakses dan ramah korban. • Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan dengan memperluas cakupan pelayanan, penguatan kader, serta penyediaan sarana yang nyaman dan inklusif. • Digitalisasi layanan PPPA dan KB guna mempercepat alur layanan, memperluas jangkauan informasi, serta mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses layanan berbasis gender dan anak. • Peningkatan edukasi dan konseling keluarga melalui pendekatan yang komunikatif, partisipatif, dan berbasis	

Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi PD	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	S3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	• Mendorong pengembangan kelompok UPPKA dan program pemberdayaan ekonomi keluarga. • Mengembangkan inovasi program keluarga berbasis kearifan lokal dan potensi desa. • Memperkuat peran keluarga dalam pencegahan stunting, kekerasan, dan disfungsi sosial. • Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja berbasis hasil (SAKIP). • Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan teknis urusan PPPA dan pengendalian penduduk. • Mengembangkan sistem informasi manajemen pelayanan dan data responsif gender dan anak. • Mendorong akuntabilitas, transparansi, dan inovasi layanan publik berbasis digital.		kebutuhan masyarakat untuk membangun keluarga yang tangguh dan berkualitas. • Penguatan integrasi layanan lintas sektor untuk memastikan pelayanan kepada perempuan, anak, keluarga, dan kelompok rentan terlaksana secara holistik, terkoordinasi, dan berkesinambungan.	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Karanganyar telah merumuskan rencana program yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun mendatang. Uraian program tersebut disajikan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini diarahkan pada Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi; Administrasi keuangan; Administrasi barang milik daerah; Adminitrasi kepegawaian; administrasi umum; pengadaan barang milik daerah; penyediaan jasa; serta pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- b. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Program ini diarahkan pada pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten; dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten.
- c. Program Perlindungan Perempuan
Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten/kota; serta penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan.
- d. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Program ini diarahkan pada advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak; serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.
- e. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak.
- f. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Program ini diarahkan pada pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha; serta penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak.
- g. Program Perlindungan Khusus Anak
Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten; serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan.
- h. Program Pengendalian Penduduk
Program ini difokuskan pada pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui perencanaan keluarga dan penyebaran penduduk yang seimbang.
- i. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Program ini difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB untuk mendukung keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.
- j. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Program ini difokuskan pada penguatan ketahanan keluarga melalui pembinaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan keluarga secara berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari rencana program yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Karanganyar merumuskan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Uraian kegiatan tersebut disajikan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Mebel
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
- c. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

2. **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
 - b. Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
- C. Program Perlindungan Perempuan**
1. **Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**
 - a. layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
 - b. layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
 - c. layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
 - d. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
 - e. Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
 3. **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- D. Program Peningkatan Kualitas Keluarga**
1. **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. **Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota
- E. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak**
1. **Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota

F. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

- 1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**
 - a. Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

G. Program Perlindungan Khusus Anak

- 1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. 2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota
 - b. Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
 - b. layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
 - c. layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
 - d. layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
 - e. Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
- 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota

H. Program Pengendalian Penduduk

- 1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**
 - a. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana
 - b. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal
 - c. Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK)
 - d. Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah

2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
- b. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
- c. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
- d. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
- e. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana
- f. Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain
- g. Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)

I. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

- a. Pengendalian Program KKBPK
- b. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
- c. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
- d. Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
- e. Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

- a. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
- b. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- c. Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
- d. Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
- b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- c. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
- d. Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
- e. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
- f. Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB
- g. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

- h. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- i. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
- j. Peningkatan Kesertaan KB Pria
- k. Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan
- 4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**
 - a. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
 - b. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
- J. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**
 - 1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**
 - a. Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL
 - b. Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
 - c. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
 - d. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
 - e. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
 - f. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
 - g. Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga
 - h. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
 - i. Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
 - 2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**
 - a. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
 - b. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
 - c. Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga
 - d. Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga
 - 3. Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)**
 - a. Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja

Tabel 4.1.
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Karanganyar

NSPAK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya insani, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga dan pemuda serta kesetaraan gender	Terwujudnya masyarakat yang setara, berkeadilan, dan berkualitas melalui peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak, penguatan pengendalian penduduk dan pelayanan KB, peningkatan kualitas pembangunan keluarga.				Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		
					Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		
					Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)		
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak			Indeks Pembangunan gender (IPG)		
Tujuan 3: Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar			Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.	1. Meningkatnya penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah di daerah - Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota - Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota - Terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
Sasaran 4 : Meningkatkan kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil							

NSPAK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				2. Meningkatnya peran dan kapasitas perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi melalui organisasi kemasyarakatan di daerah. a. Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota b. Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		c. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi b. Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Terwujudnya perlindungan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi	1. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan melalui peningkatan peran serta berbagai pihak di daerah. a. Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota 2. Meningkatnya ketersediaan dan keterpaduan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan di daerah.		Program Perlindungan Perempuan 1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota a. Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPAK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				c. Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota d. Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota e. Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota f. Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota g. Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 3. Meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan di daerah. a. Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota b. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia		a. layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota b. layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota c. layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota d. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota e. Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a. Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota b. Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPAK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
			Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan	1. Meningkatnya peran dan kapasitas lembaga penyedia layanan dalam peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak di daerah. - Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Meningkatnya akses keluarga terhadap layanan pemenuhan hak anak dan terwujudnya keluarga yang ramah anak di daerah. - Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota		Program Peningkatan Kualitas Keluarga Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota - Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota - Layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
			Terwujudnya Kabupaten/Kota yang ramah anak melalui pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.	1. Tersedianya data gender dan anak yang akurat sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
				1. Meningkatnya penerapan prinsip Perlindungan Hak Anak (PHA) pada		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	

NSPAK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha di daerah. b. Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota c. Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota a. Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota b. Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				1. Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak melalui peningkatan peran serta berbagai pihak di daerah. d. terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota e. Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA 2. Meningkatkan ketersediaan dan keterpaduan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di daerah. a. Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak		Program Perlindungan Khusus Anak 1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota a. koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota b. Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPAK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota b. Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota c. Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota d. Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota e. Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 3. Meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak di daerah. a. Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota b. terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota		a. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota b. layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota c. layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota d. layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota e. Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a. Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota b. Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	

NSPAK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk		1. Meningkatnya keselarasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. a. Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) b. Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal c. Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan d. Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah 2. Tersedianya data dan peta perkiraan pengendalian penduduk sebagai dasar perencanaan program di daerah.	TFR (Angka Kelahiran Total)	Program Pengendalian Penduduk 1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk a. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana b. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal c. Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK) d. Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah 2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPAK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				a. Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah b. Tersedianya Data dan Informasi Keluarga c. Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga d. Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB e. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) f. Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain g. Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota provinsi (Termasuk diseminasi dan		a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga b. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga c. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga d. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB e. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana f. Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain g. Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	

NSPAK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				evaluasi hasil penyusunan profil Pengendalian Penduduk dan KB)			
				1. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. a. Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK b. Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) c. Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) d. Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang e. Terlaksananya Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal a. Pengendalian Program KKBPK b. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana c. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) d. Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang e. Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) a. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	

NSPAK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 2. Meningkatnya kinerja dan peran tenaga penyuluh KB/PLKB dalam mendukung program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. a. Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) b. Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB c. Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 3. Terpenuhinya kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta meningkatnya akses pelayanan KB yang merata di daerah. a. Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke		b. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) c. Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB d. Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) c. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP d. Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	

NSPAK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya b. Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) c. Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP d. Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB e. Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB f. Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB g. Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya h. Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi i. Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak j. Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria k. Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan		a. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB b. Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB c. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya d. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi e. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak f. Peningkatan Kesertaan KB Pria g. Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan 4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB a. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas b. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	

NSPAK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				4. Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB di daerah. - Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas - Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			
				1. Meningkatnya kualitas ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam mendukung pembangunan daerah. - Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif - Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) - Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) - Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB,	IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	

NSPAK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) e. Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) f. Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) g. Terlaksananya Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) h. Tersedianya biaya operasional bagi bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) i. Terlaksananya Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian		BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) e. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) f. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) g. Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga h. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) i. Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui	

NSPAK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 2. Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dalam mendukung ketahanan dan kesejahteraan keluarga. a. Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) b. Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) c. Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga d. Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga 3. Meningkatnya pengetahuan dan kesiapan remaja dalam membangun kehidupan berkeluarga yang sehat dan bertanggung jawab. a. Terlaksananya Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan		Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga a. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) b. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) c. Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga d. Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga 3. Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) a. Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	

NSPAK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja			
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah - Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Meningkatkan kualitas administrasi keuangan perangkat daerah - Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN - Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3. Meningkatkan kualitas administrasi kepegawaian perangkat daerah - Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4. Meningkatkan kualitas administrasi kepegawaian perangkat daerah - Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rutin perkantoran	Nilai IKM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPAK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				a. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Tersedianya Bahan Logistik Kantor c. Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan d. Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu e. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6. Meningkatkan sarana prasarana sesuai standar a. Tersedianya Mebel b. Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya 7. Meningkatkan ketersediaan layanan penunjang urusan pemerintah daerah a. Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 8. Meningkatkan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran a. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan d. Fasilitasi Kunjungan Tamu e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah a. Pengadaan Mebel b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPAK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				b. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya c. Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			

Tabel 4.2.
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun		Target Dan Pagu Indikatif Tahun											Ket
				2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	72,65	72,70	4.758.922.978	72,75	5.015.758.283	72,85	4.953.758.283	72,95	4.956.758.283	73	4.976.758.283	73	5.003.667.178	
2.08.02.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	%	100	100	46.508.900	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	50.000.000	100	20.000.000	
2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	4	39.399.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	40.000.000	4	10.000.000	
2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	4	7.109.900	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	
2.08.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun	%	100	100	3.944.758.283	100	3.951.758.283	100	3.951.758.283	100	3.951.758.283	100	3.951.758.283		3.951.758.283	
2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	27	28	3.934.758.283	28	3.934.758.283	28	3.934.758.283	28	3.934.758.283	28	3.934.758.283	28	3.934.758.283	
2.08.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Laporan	4	4	10.000.000	4	17.000.000	4	17.000.000	4	17.000.000	4	17.000.000	4	17.000.000	
2.08.01.2.03. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	100	1.359.000	100	7.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
2.08.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	1.359.000	2	7.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	

Bidang/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun		Target Dan Pagu Indikatif Tahun											Ket
				2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.08.01.2.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sesuai Ketentuan	%	100	100	0	100	17.000.000	100	7.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	17.000.000	
2.08.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	1	0	1	7.000.000	1	7.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	7.000.000	
2.08.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	2	0	2	10.000.000	0	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
2.08.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rutin perkantoran	Persentase Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	%	100	100	93.406.645	100	265.000.000	100	265.000.000	100	265.000.000	100	250.000.000	100	265.000.000	
2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	22	22	5.000.000	22	15.000.000	22	15.000.000	22	15.000.000	22	15.000.000	22	15.000.000	
2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	17.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	
2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	8	7.599.750	8	10.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000	
2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	5	8.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	
2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	40	55.806.895	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	40	185.000.000	40	200.000.000	
2.08.01.2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya sarana prasarana sesuai standar	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	%	100	100	16.550.000	100	25.000.000	100	15.000.000	100	10.000.000	100	15.000.000	100	20.000.000	
2.08.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	1	0	1	10.000.000	0	0	1	10.000.000	0	0	1	10.000.000	
2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	2	16.550.000	2	15.000.000	2	15.000.000	0	0	2	15.000.000	1	10.000.000	

Bidang/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun		Target Dan Pagu Indikatif Tahun											Ket
				2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.08.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya ketersediaan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	367.821.400	100	425.000.000	100	430.000.000	100	430.000.000	100	430.000.000	100	440.000.000	
2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2	8.001.400	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	81.820.000	3	130.000.000	3	130.000.000	3	130.000.000	3	130.000.000	3	140.000.000	
2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	278.000.000	4	285.000.000	4	290.000.000	4	290.000.000	4	290.000.000	4	290.000.000	
2.08.01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	%	100	100	288.518.750	100	305.000.000	100	255.000.000	100	255.000.000	100	255.000.000	100	279.908.895	
2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	14	14	158.518.750	14	185.000.000	14	185.000.000	14	185.000.000	14	185.000.000	14	189.908.895	
2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	15.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	
2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	17	2	115.000.000	2	100.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	70.000.000	
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.	Persentase ARG pada belanja operasional APBD	%	8,70	8,80	15.000.000	8,90	300.000.000	9,00	300.000.000	9,10	300.000.000	9,20	380.000.000	9,30	380.000.000	

Bidang/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun		Target Dan Pagu Indikatif Tahun											Ket
				2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah di daerah.	Persentase lembaga/PD yang mengimplementasikan anggaran responsif gender	%	59,52	59,52	15.000.000	59,52	150.000.000	78,57	150.000.000	100	150.000.000	100	230.000.000	100	230.000.000	
2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	3	5.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	
2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Laporan	1	3	0	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	
2.08.02.2.01.0014 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang	0	75	0	75	50.000.000	75	50.000.000	75	50.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	
2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya peran dan kapasitas perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi melalui organisasi kemasyarakatan di daerah.	Persentase organisasi kemasyarakatan/profesi/d unia usaha/media/Parpol yang mendapat fasilitasi pemberdayaan perempuan	%	0	10	0	10	150.000.000	11	150.000.000	12	150.000.000	13	150.000.000	14	150.000.000	
2.08.02.2.02.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Lembaga	0	40	0	40	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	

Bidang/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun		Target Dan Pagu Indikatif Tahun											Ket
				2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	ekonomi kewenangan kab/ kota																
2.08.02.2.02.0009 Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Orang	0	250	0	250	100.000.000	250	100.000.000	250	100.000.000	250	100.000.000	250	100.000.000	
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Terwujudnya perlindungan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Per 100.000 penduduk	4,20	4,19	215.330.400	4,18	375.330.400	4,17	375.330.400	4,16	375.330.400	4,15	375.330.400	4,15	375.330.400	
2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan melalui peningkatan peran serta berbagai pihak di daerah.	Persentase perempuan rentan kekerasan yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi KTP dan TPPO	%	0,03	0,03	65.750.000	0,03	50.000.000	0,03	50.000.000	0,03	50.000.000	0,03	50.000.000	0,03	50.000.000	
2.08.03.2.01.0006 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Lembaga	22	17	0	17	50.000.000	17	50.000.000	17	50.000.000	17	50.000.000	17	50.000.000	
2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketersediaan dan keterpaduan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan di daerah.	Persentase layanan rujukan lanjutan yang disediakan pada korban kekerasan	%	100	100	115.070.000	100	225.330.400	100	225.330.400	100	225.330.400	100	225.330.400	100	225.330.400	
2.08.03.2.02.0005 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan	Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	orang	25	25	0	25	30.000.000	25	30.000.000	25	30.000.000	25	30.000.000	25	30.000.000	

Bidang/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun		Target Dan Pagu Indikatif Tahun											Ket
				2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tingkat Kabupaten/Kota																
2.08.03.2.02.0006 layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	25	25	0	25	30.000.000	25	30.000.000	25	30.000.000	25	30.000.000	25	30.000.000	
2.08.03.2.02.0007 layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	orang	25	25	0	25	35.000.000	25	35.000.000	25	35.000.000	25	35.000.000	25	35.000.000	
2.08.03.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	orang	25	25	0	25	65.330.400	25	65.330.400	25	65.330.400	25	65.330.400	25	65.330.400	
2.08.03.2.02.0009 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	orang	25	25	0	25	65.000.000	25	65.000.000	25	65.000.000	25	65.000.000	25	65.000.000	
2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas lembaga penyedia layanan dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan di daerah.	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang memberikan layanan sesuai standar	%	100	100	34.510.400	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
2.08.03.2.03.0005 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	0	3	0	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	

Bidang/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun		Target Dan Pagu Indikatif Tahun											Ket
				2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.08.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	orang	0	50	0	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan	Persentase Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	%	2,26	2,80	50.000.000	3,30	250.000.000	3,90	250.000.000	4,50	250.000.000	5,60	250.000.000	6,20	250.000.000	
2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya peran dan kapasitas lembaga penyedia layanan dalam peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak di daerah.	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang tersedia	%	11	11	0	11	150.000.000	11	150.000.000	11	150.000.000	11	150.000.000	11	150.000.000	
2.08.04.2.02.0008 Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	0	20	0	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	
2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akses keluarga terhadap layanan pemenuhan hak anak dan terwujudnya keluarga yang ramah anak di daerah.	Persentase keluarga yang mendapat layanan penjangkauan	%	0,001 7	0,001 7	50.000.000	0,0017	100.000.000	0,0017	100.000.000	0,0017	100.000.000	0,001 7	100.000.000	0,001 7	100.000.000	
2.08.04.2.03.0002 layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	0	500	0	500	100.000.000	500	100.000.000	500	100.000.000	500	100.000.000	500	100.000.000	
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya kualitas data gender dan anak yang akurat sebagai dasar perencanaan	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan data pilah gender dan anak	%	40,48	42,85	5.000.000	45,23	122.908.895	47,61	84.908.895	50,00	81.908.895	52,38	61.908.895	54,76	35.000.000	

Bidang/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun		Target Dan Pagu Indikatif Tahun											Ket
				2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	dan pengambilan kebijakan																
2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data gender dan anak yang akurat sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase PD yang melakukan pengumpulan dan penyajian data gender dan anak	%	59,52	59,52	5.000.000	59,52	122.908.895	59,52	84.908.895	59,52	81.908.895	59,52	61.908.895	59,52	35.000.000	
2.08.05.2.01.0003 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1		0	1	122.908.895	1	84.908.895	1	81.908.895	1	61.908.895	1	35.000.000	
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terpenuhinya hak-hak anak dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan partisipasi	Persentase kasus kekerasan anak yang dilayani secara komprehensif	%	100,00	100,00	140.000.000	100,00	280.000.000	100,00	280.000.000	100,00	280.000.000	100,00	280.000.000	100,00	280.000.000	
2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya penerapan prinsip Perlindungan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha di daerah.	Persentase lembaga masyarakat pemerintah dunia usaha yang telibat di dalam pemenuhan hak anak	%	100	100	45.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	
2.08.06.2.01.0003 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	40	40	0	40	140.000.000	40	140.000.000	40	140.000.000	40	140.000.000	40	140.000.000	

Bidang/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun		Target Dan Pagu Indikatif Tahun											Ket
				2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya penerapan prinsip Perlindungan Hak Anak (PHA) pada lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak (lembaga pemerintah dan non pemerintah) di daerah	Persentase lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) di daerah	%	100	100	95.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	
2.08.06.2.02.0007 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	1	18	0	18	140.000.000	18	140.000.000	18	140.000.000	18	140.000.000	18	140.000.000	
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Terlindunginya anak dari situasi khusus yang mengancam tumbuh kembang dan masa depannya	Rasio kekerasan terhadap anak per 100.000 anak	Per 100.000 penduduk	7,30	7,29	205.329.600	7,28	495.329.600	7,27	495.329.600	7,26	495.329.600	7,25	495.329.600	7,25	495.329.600	
2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak melalui peningkatan peran serta berbagai pihak di daerah.	Persentase kader perlindungan perempuan dan anak yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	25	25	55.750.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	
2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1	1	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
2.08.07.2.01.0010 Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Orang	20	200	0	200	50.000.000	200	50.000.000	200	50.000.000	200	50.000.000	200	50.000.000	

Bidang/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun		Target Dan Pagu Indikatif Tahun											Ket
				2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketersediaan dan keterpaduan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di daerah.	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan perlindungan khusus	%	100	100	115.070.000	100	245.329.600	100	245.329.600	100	245.329.600	100	245.329.600	100	245.329.600	
2.08.07.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	30	30	0	30	75.329.600	30	75.329.600	30	75.329.600	30	75.329.600	30	75.329.600	
2.08.07.2.02.0009 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	30	30	0	30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	
2.08.07.2.02.0010 layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	30	30	0	30	35.000.000	30	35.000.000	30	35.000.000	30	35.000.000	30	35.000.000	
2.08.07.2.02.0012 layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	30	30	0	30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	
2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	30	30	0	30	75.000.000	30	75.000.000	30	75.000.000	30	75.000.000	30	75.000.000	

Bidang/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun		Target Dan Pagu Indikatif Tahun											Ket
				2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas lembaga penyedia layanan dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak di daerah.	Persentase penyedia layanan bagi anak korban kekerasan yang mendapatkan fasilitasi	%	100	100	34.509.600	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	
2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Dokumen	1	1	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
2.08.07.2.03.0009 koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Dokumen	1	1	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk secara proporsional dan berkelanjutan	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	4,42	4,35	374.369.000	4,30	1.383.148.000	4,20	1.383.148.000	4,20	1.383.148.000	4,10	1.383.148.000	4,10	1.383.148.000	
2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Meningkatnya keselarasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.	Jumlah kebijakan pengendalian penduduk yang diimplementasikan	persen	100	100	20.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	
2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kegiatan	0	0	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	

Bidang/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun		Target Dan Pagu Indikatif Tahun											Ket
				2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.14.02.2.01.0027 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Satuan Pendidikan	0	0	0	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	
2.14.02.2.01.0032 Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK)	Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Dokumen	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
2.14.02.2.01.0034 Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Perangkat Daerah	0	0	0	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	
2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan peta perkiraan pengendalian penduduk sebagai dasar perencanaan program di daerah.	Jumlah dokumen profil kependudukan	Dokumen	1	1	354.369.000	1	1.083.148.000	1	1.083.148.000	1	1.083.148.000	1	1.083.148.000	1	1.083.148.000	
2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	4	4	25.720.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	

Bidang/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun			Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	dan perencanaan pembangunan daerah																
2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	2	2	3.404.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	12	12	138.600.000	12	250.800.000	12	250.800.000	12	250.800.000	12	250.800.000	12	250.800.000	
2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	12	12	186.645.000	12	203.600.000	12	203.600.000	12	203.600.000	12	203.600.000	12	203.600.000	
2.14.02.2.02.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	Laporan	2	2	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
2.14.02.2.02.0026 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Unit	0	177	0	177	250.000.000	177	250.000.000	177	250.000.000	177	250.000.000	177	250.000.000	
2.14.02.2.02.0027 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota provinsi (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	0	1	0	1	78.748.000	1	78.748.000	1	78.748.000	1	78.748.000	1	78.748.000	

Bidang/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun		Target Dan Pagu Indikatif Tahun											Ket
				2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	penyusunan profil Pengendalian Penduduk dan KB)																
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana yang merata dan mudah diakses	Persentase Jumlah Peserta KB/mCPR	%	70,22	70,25	5.351.964.800	70,50	4.361.672.000	70,75	3.361.672.000	71,00	3.361.672.000	71,25	3.361.672.000	71,50	4.361.672.000	
		Persentase Kampung KB Mandiri	%	27,70	28,80		30,00		31,00		32,00		32,90		33,80		
		Kelahiran Tidak Diinginkan	%	10,30	10,00		9,60		9,30		9,00		8,70		8,50		
		Demand Satisfied	%	87,83	88,60		89,30		89,90		90,60		91,10		91,70		
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.	Persentase KIE yang menggunakan kearifan budaya lokal	%	25	25	1.050.424.800	25	646.282.000	25	409.500.000	25	409.500.000	25	409.500.000	25	646.282.000	
2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	1	1	0	1	30.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	
2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	17	17	680.000.000	17	280.000.000	17	169.500.000	17	169.500.000	17	169.500.000	17	280.000.000	
2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa	Laporan	2	2	255.000.000	2	255.000.000	2	170.000.000	2	170.000.000	2	170.000.000	2	255.000.000	

Bidang/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun		Target Dan Pagu Indikatif Tahun											Ket
				2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)															
2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	4	3	30.632.000	4	61.282.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	61.282.000	
2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terlaksananya Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	30	30	80.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	
2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Meningkatnya kinerja dan peran tenaga penyuluh KB/PLKB dalam mendukung program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.	Persentase penyuluh KB yang memiliki kompetensi	%	100	100	1.910.500.000	100	1.717.640.000	100	1.325.022.000	100	1.325.022.000	100	1.325.022.000	100	1.717.640.000	
2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	1827	1827	1.910.500.000	1827	1.425.640.000	1827	1.246.750.000	1827	1.246.750.000	1827	1.246.750.000	1827	1.425.640.000	
2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	0	177	0	177	122.000.000	177	35.772.000	177	35.772.000	177	35.772.000	177	122.000.000	

Bidang/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun		Target Dan Pagu Indikatif Tahun											Ket
				2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.14.03.2.02.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	12	12	0	12	170.000.000	12	42.500.000	12	42.500.000	12	42.500.000	12	170.000.000	
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta meningkatnya akses pelayanan KB yang merata di daerah.	Persentase faskes yang memiliki alat dan obat kontrasepsi yang sesuai kebutuhan	%	100	100	2.262.210.000	100	1.385.200.000	100	1.461.700.000	100	1.461.700.000	100	1.461.700.000	100	1.385.200.000	
2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Laporan	4	4	56.700.000	4	60.200.000	4	56.700.000	4	56.700.000	4	56.700.000	4	60.200.000	
2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	4125	4145	1.868.190.000	4145	900.000.000	4140	920.000.000	4145	920.000.000	4150	920.000.000	4155	900.000.000	
2.14.03.2.03.0004 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan	4	4	5.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	

Bidang/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun		Target Dan Pagu Indikatif Tahun											Ket
				2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.14.03.2.03.0005 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dokumen	1	1	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	0	1	0	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	50.000.000	
2.14.03.2.03.0007 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Orang	0	35	0	35	70.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	35	70.000.000	
2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	4	4	37.400.000	4	100.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	100.000.000	
2.14.03.2.03.0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	0	5	0	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	
2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	0	4	0	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	
2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Laporan	4	4	9.920.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	
2.14.03.2.03.0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Orang	40	35	285.000.000	35	70.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	35	70.000.000	

Bidang/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun		Target Dan Pagu Indikatif Tahun											Ket
				2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB di daerah.	Persentase Kampung KB aktif	%	38	40	128.830.000	40	612.550.000	50	165.450.000	60	165.450.000	70	165.450.000	80	612.550.000	
2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung	64	177	128.830.000	177	597.550.000	177	150.450.000	177	150.450.000	177	150.450.000	177	597.550.000	
2.14.03.2.04.0007 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	12	1	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial	Persentase kelembagaan ketahanan keluarga aktif	%	92,30	93,00	4.914.658.400	93,50	3.928.800.000	94,00	2.928.800.000	94,50	2.928.800.000	95,00	2.928.800.000	95,00	2.928.800.000	
		Indeks Lansia Berdaya	Angka	55,51	56,00		56,50		57,00		57,40		57,90		58,40		
		Indeks Pengasuhan Remaja	Angka	89,51	90,20		90,90		91,15		92,10		92,70		93,10		
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya kualitas ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam mendukung pembangunan daerah.	Persentase Desa/kelurahan yang memiliki kelompok ketahanan keluarga	%	90	91	96.908.400	91	428.400.000	92	428.400.000	93	428.400.000	94	428.400.000	95	428.400.000	
2.14.04.2.01.0015 Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	Kegiatan	0	2	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	

Bidang/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun		Target Dan Pagu Indikatif Tahun											Ket
				2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan / Dokumen	0	4	0	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	
2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	1	4	7.448.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	
2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia	Unit	30	20	71.800.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	
2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Orang	2	68	11.424.000	68	10.000.000	68	10.000.000	68	10.000.000	68	10.000.000	68	10.000.000	
2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Laporan	0	68	0	68	10.000.000	68	10.000.000	68	10.000.000	68	10.000.000	68	10.000.000	

Bidang/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun		Target Dan Pagu Indikatif Tahun											Ket
				2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.14.04.2.01.0023 Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	Terlaksananya Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Dokumen	0	1	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
2.14.04.2.01.0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Tersedianya biaya operasional bagi bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kelompok	1	177	0	177	158.400.000	177	158.400.000	177	158.400.000	177	158.400.000	177	158.400.000	
2.14.04.2.01.0029 Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Terlaksananya Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Laporan	0	1	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dalam mendukung ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	Persentase keluarga berisiko stunting yang dibina	%	100	100	4.817.750.000	100	3.500.400.000	100	2.500.400.000	100	2.500.400.000	100	2.500.400.000	100	2.500.400.000	
2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	12	2	2.154.000.000	2	1.077.000.000	2	1.077.000.000	2	1.077.000.000	2	1.077.000.000	2	1.077.000.000	

Bidang/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline Tahun		Target Dan Pagu Indikatif Tahun											Ket
				2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Laporan	12	2	2.584.800.000	2	2.369.400.000	2	1.369.400.000	2	1.369.400.000	2	1.369.400.000	2	1.369.400.000	
2.14.04.2.02.0007 Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Laporan	1	1	0	1	44.000.000	1	44.000.000	1	44.000.000	1	44.000.000	1	44.000.000	
2.14.04.2.02.0008 Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Laporan	1	1	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	

Berikut ini program prioritas dan program unggulan daerah dalam lima tahun ke depan:

Tabel 4.3.
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1. Program pengendalian penduduk	1. Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk secara seimbang dan berkelanjutan.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk a. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana b. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal c. Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK) d. Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga b. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga c. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga d. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB e. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana f. Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain g. Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	
	2. Program pembinaan keluarga berencana (KB)	2. Meningkatnya akses dan cakupan layanan KB yang berkualitas dan inklusif.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal a. Pengendalian Program KKBPK b. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana c. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) d. Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang e. Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) a. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB b. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) c. Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB d. Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) c. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP d. Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB e. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB f. Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB g. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya h. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi i. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak j. Peningkatan Kesertaan KB Pria k. Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			a. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas b. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
	3. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	3. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan ekonomi keluarga.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga a. Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL b. Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) c. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) d. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) e. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) f. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) g. Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga h. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) i. Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga a. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) b. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) c. Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan	

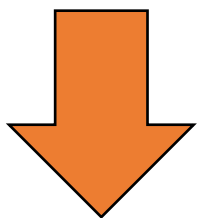
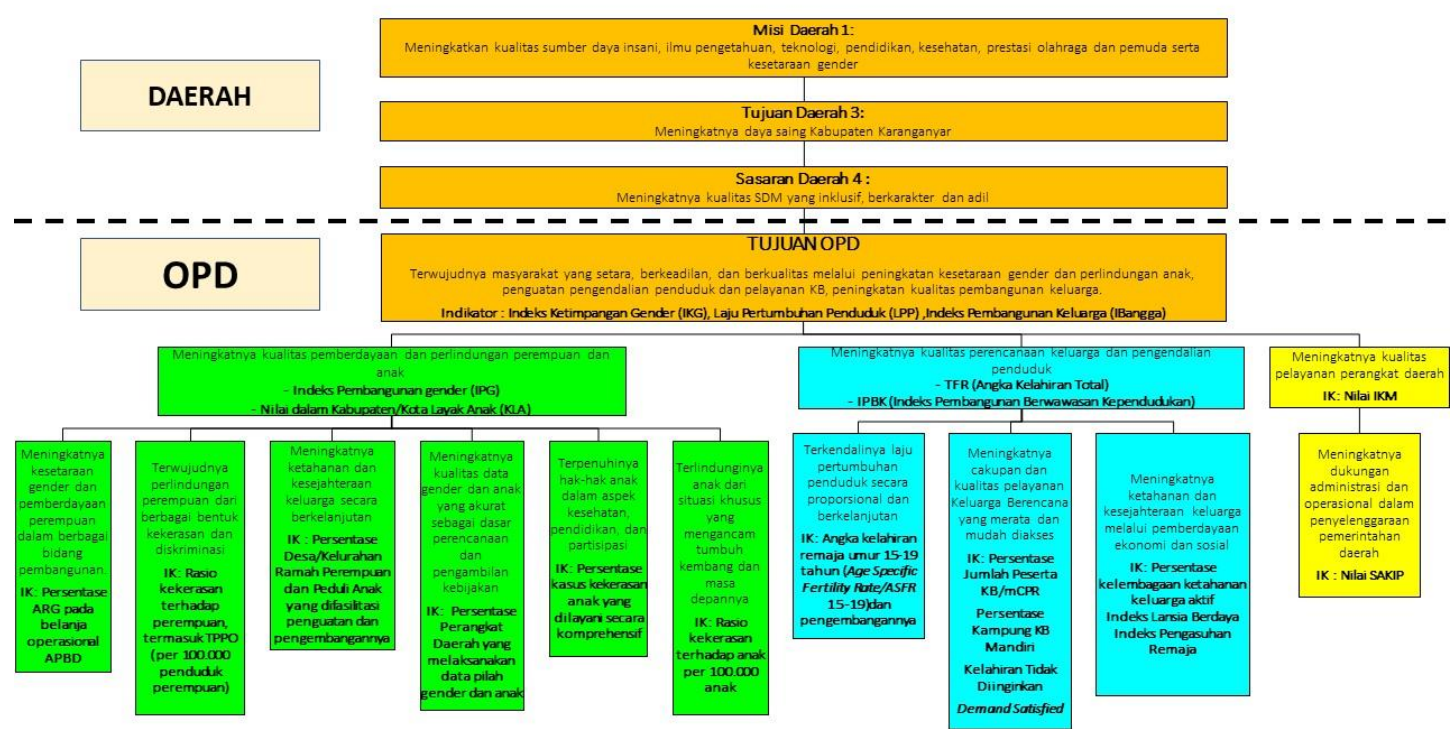
No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga d. Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	
	4. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	4. Meningkatnya kesetaraan gender dan peran aktif perempuan dalam pembangunan.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota c. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi b. Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
	5. Program perlindungan perempuan	5. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan meningkatnya sistem perlindungan yang responsif.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota a. Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota a. layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota b. layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota c. layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota d. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota e. Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan	

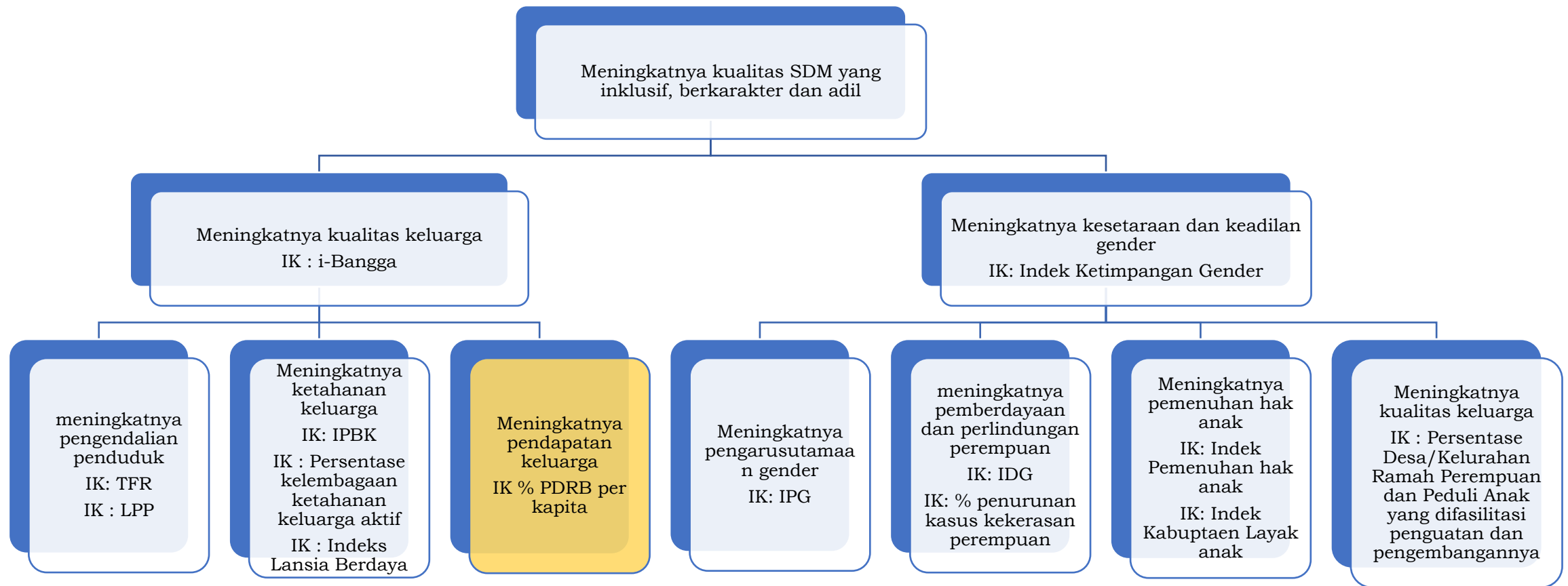
No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a. Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota b. Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	6. Program peningkatan kualitas keluarga	6. Meningkatnya kualitas pengasuhan dan ketahanan keluarga sepanjang siklus kehidupan.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota a. Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota a. Layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
	7. Program pengelolaan sistem data gender dan anak	7. Tersedianya data gender dan anak yang valid dan terintegrasi untuk pengambilan kebijakan.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a. Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
	8. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	8. Meningkatnya pemenuhan hak dasar anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota a. Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota b. Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
	9. Program perlindungan khusus anak	9. Terlindunginya anak dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya melalui sistem perlindungan terpadu.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota a. 2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota b. Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang	

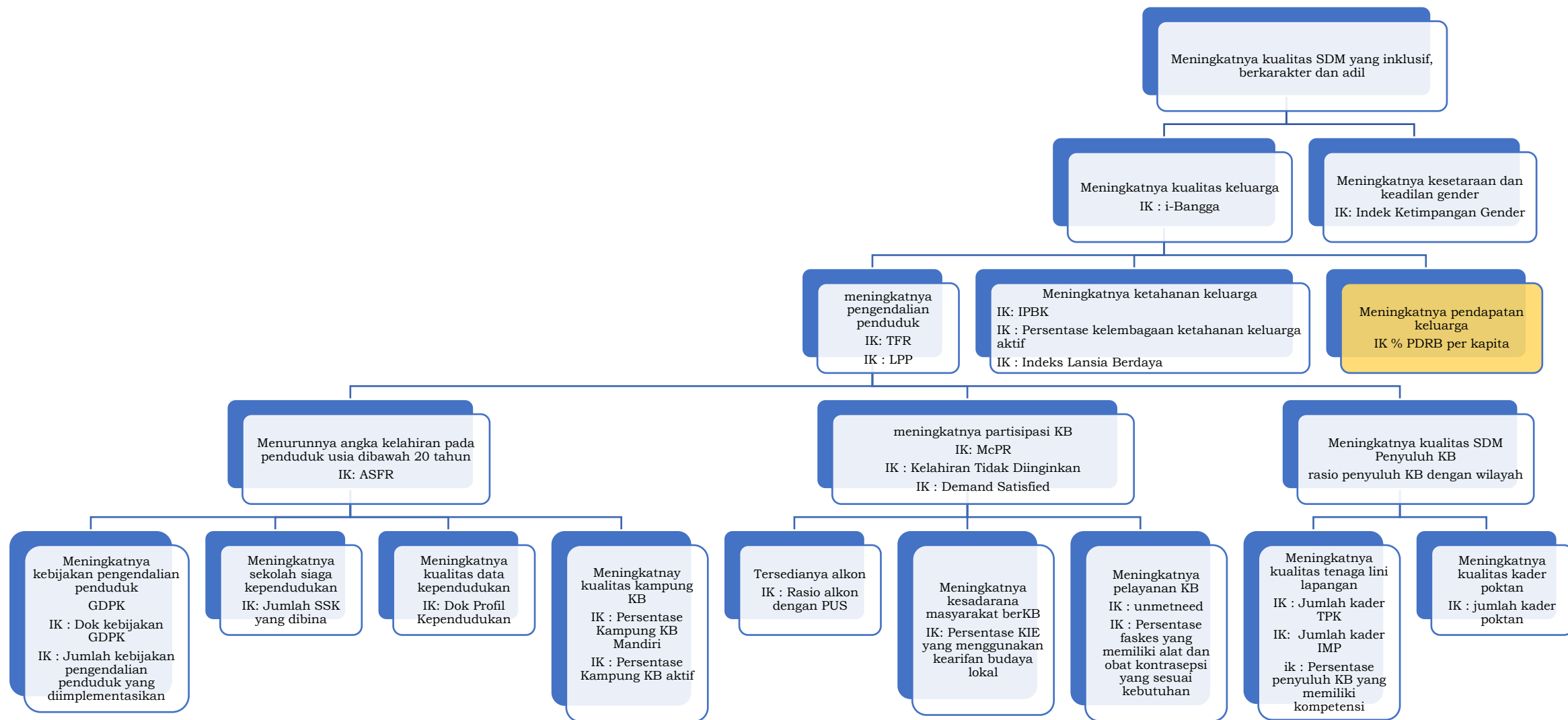
No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota b. layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota c. layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota d. layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota e. Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a. Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota b. Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	

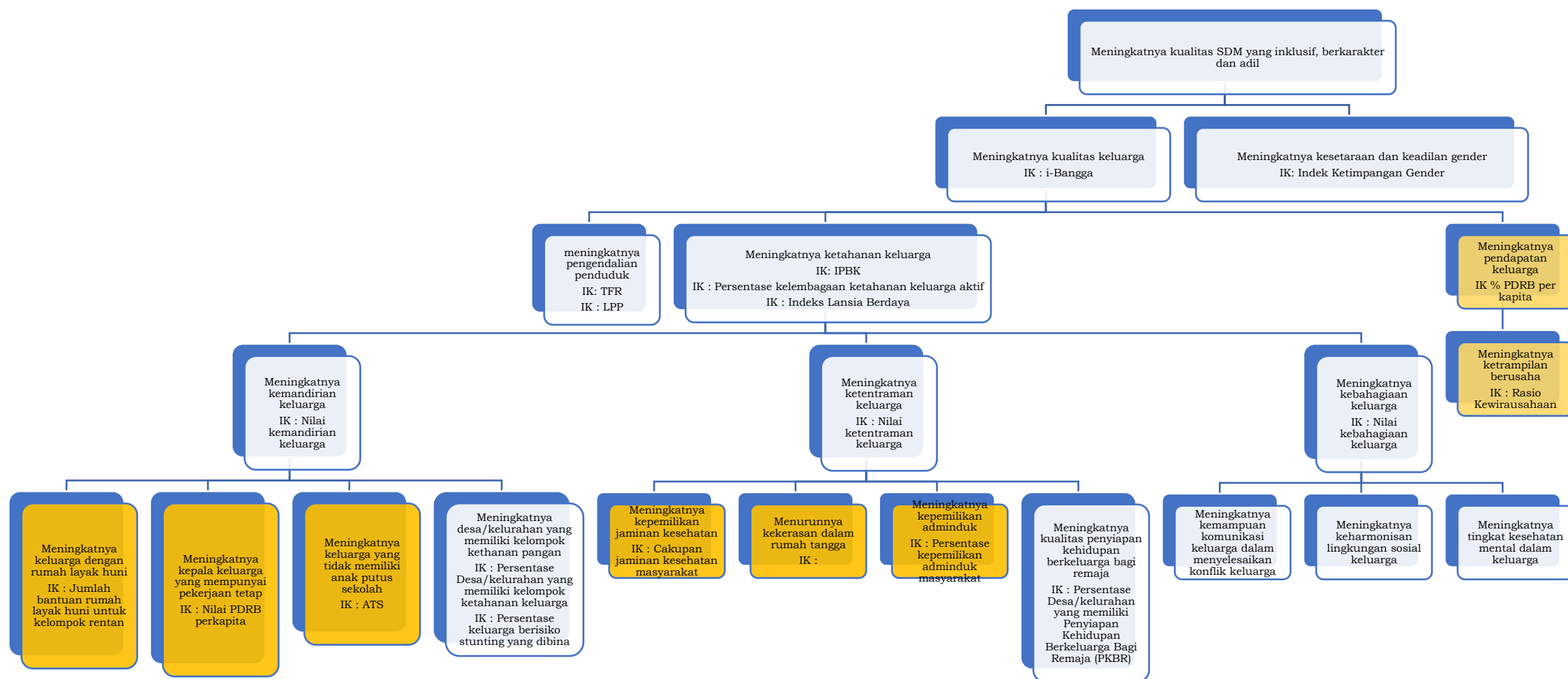
Secara ringkas dukungan (OPD) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, digambarkan dalam bentuk Pohon Kinerja berikut :

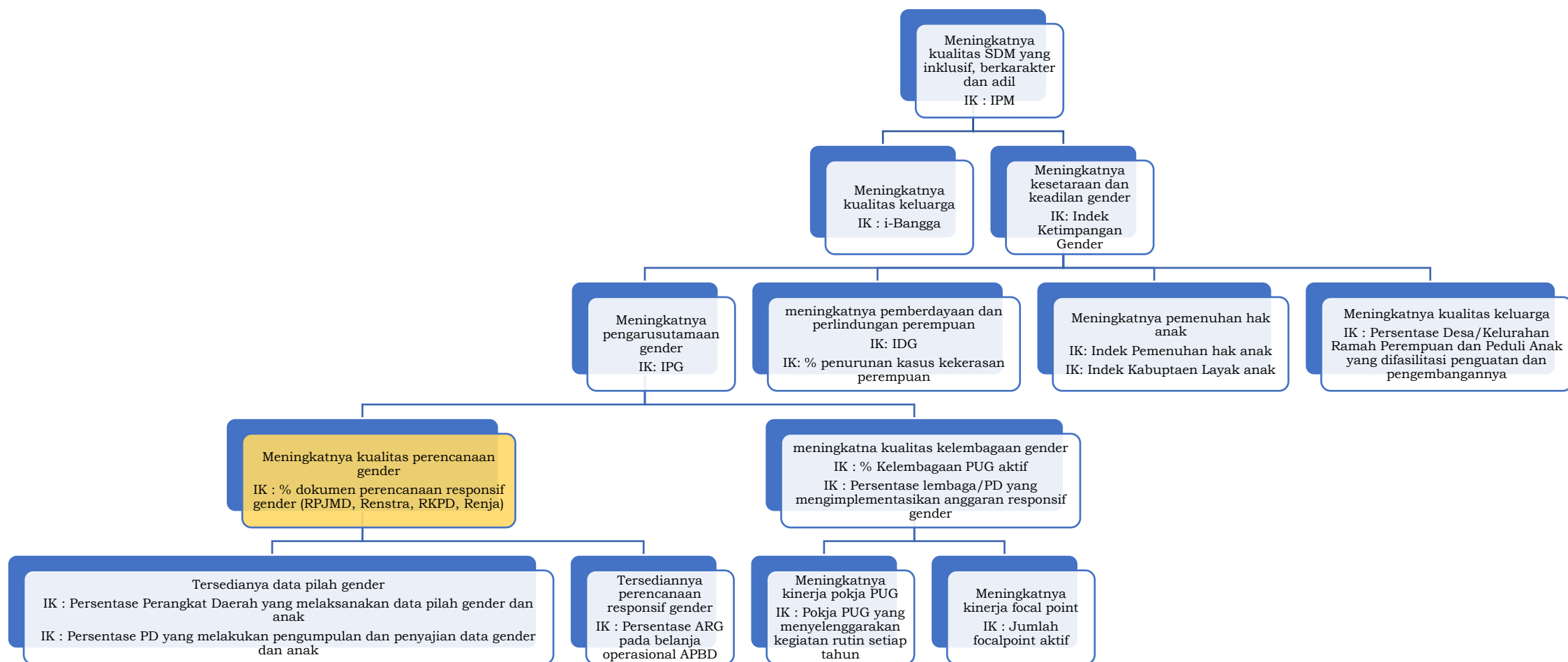
Gambar 4.1. Pohon Kinerja DP3APPKB Kabupaten Karanganyar

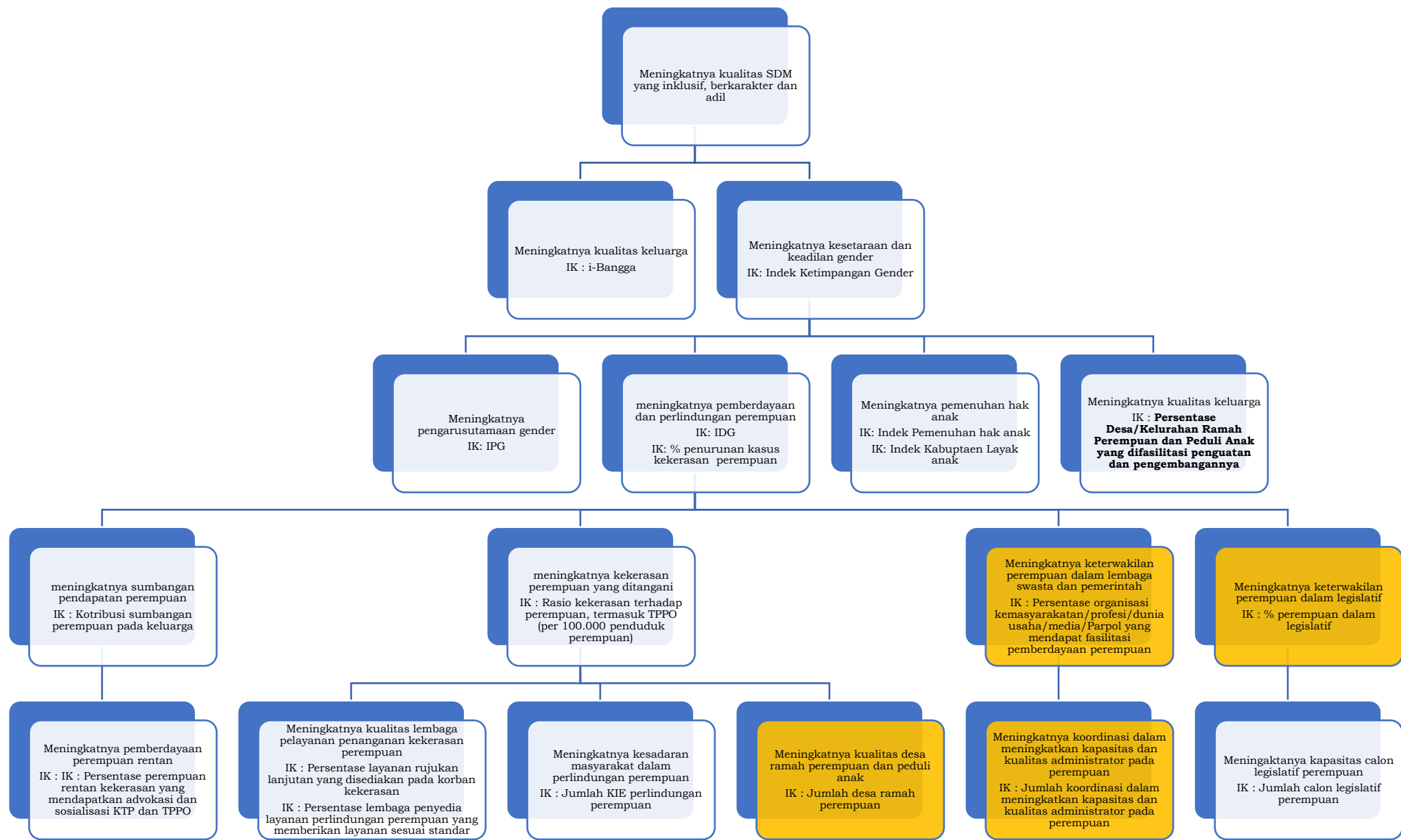


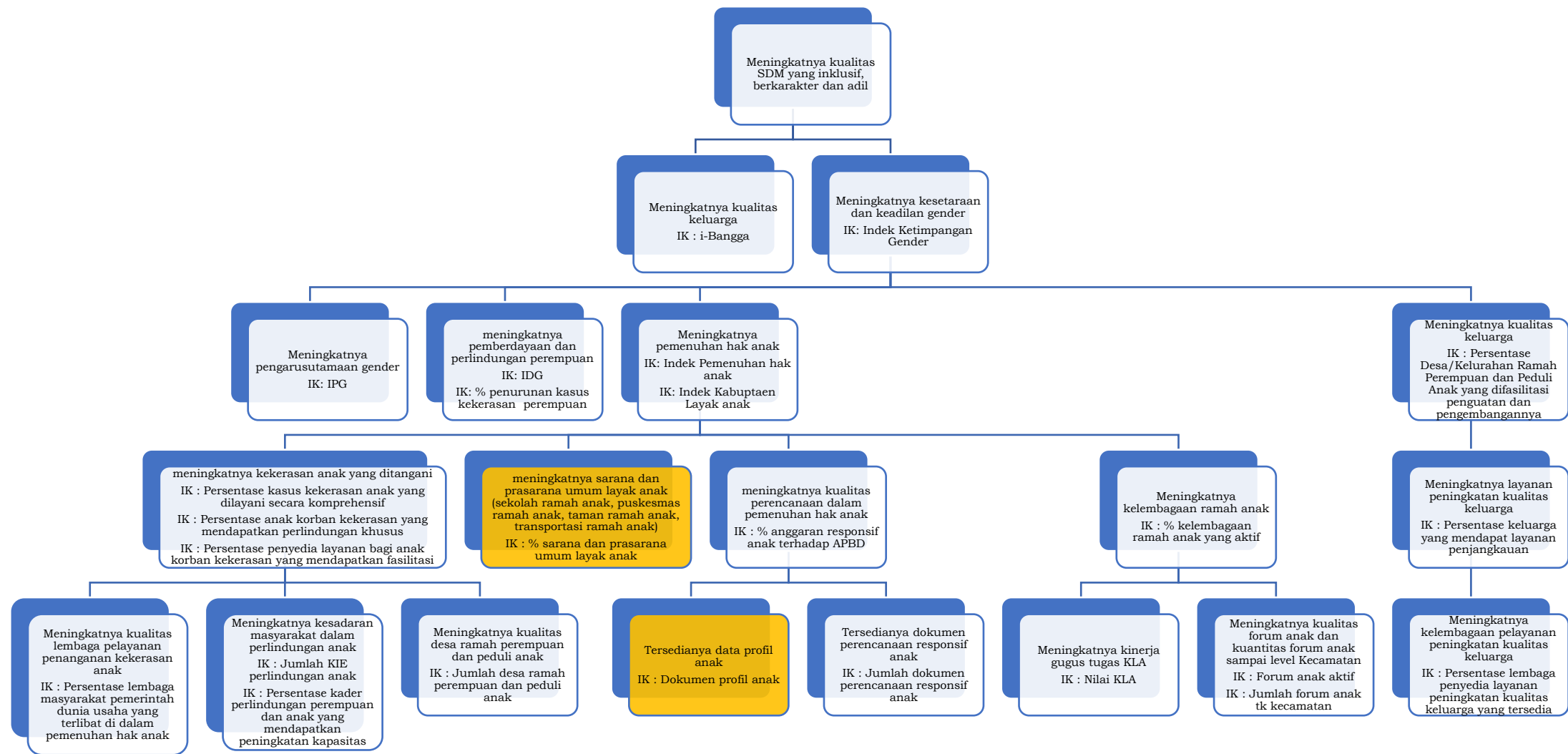












Berikut ini dukungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Karanganyar pada 35 Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah yang didelegasikan ke Kabupaten/Kota:

Tabel 4.4.
Dukungan Kegiatan Kabupaten Karanganyar Terhadap 35 Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah yang Didelegasikan ke Kabupaten/Kota

No.	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan/Subkegiatan	Urusan
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota • Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG • Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota • Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota • Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi • Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinator: Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Urusan Pendukung: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata
2.	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota • Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota • layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota • layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota • layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

No.	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan/Subkegiatan	Urusan
		- Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota - Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota - Layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah,	

No.	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan/Subkegiatan	Urusan
		Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota - layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota - Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur strategis yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran utama DP3APPKB Kabupaten Karanganyar dalam mendukung pembangunan daerah. IKU mencerminkan capaian hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program prioritas yang berkontribusi langsung terhadap visi dan misi kepala daerah.

Penyusunan IKU dilakukan secara terintegrasi dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti RPJMD dan Rencana Pembangunan Nasional. IKU disusun dengan prinsip SMART (*Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*) sehingga dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja. Berikut adalah indikator kinerja utama DP3APPKB Kabupaten Karanganyar :

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Utama DP3APPKB Kabupaten Karanganyar

No.	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2024	Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,262	0,262	0,260	0,259	0,257	0,256	0,255
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	97,16	97,30	97,45	97,60	97,75	97,90	98,00
3	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	608,00	622,45	622,46	622,47	622,48	622,49	622,50
4	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,75	0,70	0,68	0,65	0,63	0,61	0,60
5	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Angka	67,45	66,67	66,68	66,69	66,70	66,71	66,72
6	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	1,94	1,95	1,98	1,99	2,00	2,00	2,00
7	IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	Angka	65,90	66,20	66,50	66,70	66,90	67,10	67,50
8	Nilai IKM	Nilai	82,12	82,21	82,28	82,34	82,40	82,45	82,52

4.2.1. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran utama yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis DP3APPKB Kabupaten Karanganyar selama periode perencanaan. IKK disusun secara terukur, relevan, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar. Berikut adalah indikator kinerja kunci (IKK) DP3APPKB Kabupaten Karanganyar :

Tabel 4.6.
Indikator Kinerja Kunci DP3APPKB Kabupaten Karanganyar

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	1,94	1,95	1,98	1,99	2,00	2,00	2,00	
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	70,22	70,25	70,5	70,75	71,00	71,25	71,5	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	8,94	8,50	8,10	7,80	7,60	7,50	7,40	
4	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	8,70	8,80	8,90	9,00	9,10	9,20	9,30	
5	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	/100.000 penduduk	4,20	4,19	4,18	4,17	4,16	4,15	4,15	

BAB V

PENUTUP

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DP3AP2KB setiap tahun selama periode 2025–2029 dengan tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029. Adapun kaidah pelaksanaan Renstra DP3AP2KB adalah sebagai berikut:

1. **Seluruh bidang dan subbagian di lingkungan DP3AP2KB** wajib mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan melaksanakan program serta kegiatan sesuai urusan kewenangannya secara optimal dan akuntabel.
2. **Setiap aparatur DP3AP2KB** diharapkan menjalin sinergi, koordinasi, dan kerja sama yang kuat antar bidang dan dengan pemangku kepentingan lintas sektor guna menjamin keterpaduan pelaksanaan program dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.
3. **Renstra DP3AP2KB** akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas setiap tahunnya untuk kurun waktu 2025–2029. Penyusunan Renja wajib mengacu dan konsisten terhadap arah kebijakan, strategi, sasaran, dan target kinerja yang tercantum dalam dokumen Renstra.
4. **Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan kegiatan** dilakukan secara berkala untuk mengukur capaian, efektivitas kebijakan, serta sebagai dasar penyempurnaan pelaksanaan Renstra guna memastikan efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan program.
5. **Jika terjadi perubahan kebijakan pembangunan** baik di tingkat nasional maupun daerah yang berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program DP3AP2KB, maka perubahan Renstra dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Renstra ini disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar. Pelaksanaannya diharapkan dilakukan dengan dedikasi, profesionalisme, serta semangat pelayanan dan pengabdian oleh seluruh jajaran DP3AP2KB Kabupaten Karanganyar.

5.2. Pedoman Transisi

Masa berlaku **Rencana Strategis DP3AP2KB Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029** mengikuti masa berlaku **RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029**. Dokumen Renstra ini juga dapat menjadi **pedoman sementara** dalam penyusunan **Renja Tahun 2030**, sebelum ditetapkannya Renstra periode berikutnya, guna memastikan kesinambungan arah kebijakan dan program pelayanan kepada masyarakat.

5.3. Pedoman Penyusunan Evaluasi dalam Manajemen Pengelolaan Risiko

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini akan dilengkapi dengan dokumen Pengelolaan Risiko Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RSO) yang bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sebagaimana peraturan per undang-undangan yang berlaku.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Tahun 2025-2029 ini disusun dengan harapan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh stakeholder dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
2. Kepala Baperlitbang	
3. Sekretaris Baperlitbang	
4. Kepala Bidang Sosial Budaya Baperlitbang	